

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Tidak ada perkembangan di lingkungan strategis global selama bertahun-tahun ke belakang yang lebih menggambarkan benturan sekaligus penggabungan antara modernitas dan tradisi selain dengan kebangkitan dari ISIS atau dalam Bahasa Arab disebut dengan *ad-Dawlah al-Islāmiyah fī 'l-'Irāq wa-sh-Shām* (الدولة الإسلامية في العراق والشام) atau disingkat dengan Daesh. (*The Hague Centre for Strategic Studies, 2017*) Kemunculan ISIS di tahun 2013 sampai 2014, organisasi tersebut berhasil menarik perhatian komunitas internasional melalui tindakan yang tergolong brutal dan mereka menyiarkan secara luas, diikuti dengan proklamasi terbentuknya negara “Islam” mereka dan tentunya cara-cara mereka mendirikan sebuah negara tentunya melanggar ketentuan internasional termasuk diantaranya mengenai batas-batas negara. Peneliti teringat pernyataan pengamat Kawasan Timur-Tengah yaitu Patrick Cockburn, beliau menyatakan bahwa;

“[t]he birth of the new state is the most radical change to the political geography of the Middle East since the Sykes-Picot Agreement was implemented in the aftermath of the First World War.” (Patrick, 2015)

Bahwa, kelahiran negara baru ini merupakan perubahan paling radikal terhadap geopolitik di Timur Tengah sejak perjanjian Sykes-Picot diterapkan setelah Perjanjian Pertama Perang Dunia. Kemunculan ISIS kemudian menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan akademisi seperti, darimana asalnya? Apakah mereka mampu bertahan? Apakah bisa dikalahkan? Adapun dalam Sub bab ini akan dijelaskan pemahaman mengenai sejarah terbentuk dan juga sebak terjang dari ISIS hingga akhir kejayaan dari ISIS, lalu milisi teroris asing asal Indonesia yang bergabung

dengan ISIS hingga adanya indikasi menggeserkan peta konflik ke Indonesia melalui tangan-tangan dan pemikiran dari para milisi teroris asing tersebut dan juga *returnee* yang telah Kembali ke Indonesia.

4.1.1 Sejarah Terbentuk dan Sepak Terjang ISIS

Menyusul serangan 9 September atau sering disebut dengan 9/11, pemerintah Amerika Serikat melalui pernyataan dari Presiden George W. Bush mendeklarasikan perang terhadap terror (*Global War on Terrorism*),

“Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them”. (The Washington Post, 2001)

Pernyataan dari Presiden Amerika Serikat tersebut kemudian disusul dengan melancarkan serangan militer melawan Al-Qaeda dan juga negara-negara yang berusaha melindungi kelompok tersebut yang dalam hal ini ialah Afghanistan dan Irak. Sementara Al-Qaeda tidak berada di Irak pada saat Invasi Amerika Serikat pada tahun 2003, tahun demi tahun kekacauan yang terjadi di negara-negara tersebut tentunya memberikan tempat berkembang biak yang ideal untuk bermetastatis serta guna menguatkan pengaruhnya di Irak dan sekitarnya. (Chilcot Report, 2002)

Lebih lanjut, kemunculan ISIS telah dipicu oleh adanya dua keputusan penting dari Koalisi Otoritas Sementara (CPA) yang menyatakan pemindahan sementara otoritas pemerintahan Irak dan pembubaran militer Irak. Keputusan ini tentunya menabur benih konflik sektarian Irak yang membenturkan antara Sunni dan Syiah pada tahun 2006 hingga 2007. Keputusan CPA hamper secara eksklusif mempengaruhi populasi Sunni Irak. Kebuntuan yang muncul antara Sunni dan Syiah jelas terjadi akibat Al-Qaeda di Irak yang kemudian menjadi Negara Islam Irak atau ISI. Setelah tahun 2010, berbagai suku Sunni di Irak kemudian mulai mendukung ISIS di Irak, perlu diketahui bahwa ISI merupakan cikal bakal dari ISIS yang berafiliasi dengan Al-Qaeda karena diskriminasi sistematis, marginalisasi,

dan serangkaian ingkar janji dari otoritas sementara dari pemerintah di Baghdad.

Maka dari itu, dapat diketahui bahwa ISIS merupakan Lahir dari rahim al-Qaeda di Irak (AQI), hal ini juga senada dengan pernyataan dari informan ketika peneliti melakukan sesi wawancara bersama salahsatu mantan petinggi Jama'ah Islamiah (JI) yaitu bapak Nasir Abbas,

“Cikal bakal dari kelompok ISIS ialah berasal dari Al-Qaeda, sehingga tidak aneh apabila ada anggota dari kelompok JI yang terpengaruh Al-Qaeda kemudian bergabung dan berbai'at kepada ISIS karena merasa tujuan dan memiliki sudut pandang yang sama mengenai konsep Jihad baik secara ideologi maupun teoritis”. (Nasir Abbas,2021)

Kemudian seiring berjalannya waktu, ISIS dilintasi sejumlah simpatisan dan personel dari berbagai kelompok teroris, ISIS juga mengalami beberapa kali pergantian nama sebelum menjadi jaringan yang ada seperti saat ini. Meskipun istilah “Kelompok Jihad” tidak cukup mencerminkan banyak nuansa Islam di dalam dan diantara anggota kelompok, ISIS tetap konsisten menebarkan terror atas nama agama yang sesungguhnya ajaran agama Islam tidak ada yang mengajarkan terror. ISIS percaya bahwa hukum Islam atau nilai-nilai Islam harus memainkan peran sentral dalam kehidupan publik. (Shadi, 2001) Apabila sama sekali tidak ada tentang pencampuran nilai-nilai Islam dengan kehidupan publik, maka harus dipaksakan dengan cara kekerasan, atau bertentangan dengan pluralisme dan sekularisme. Islamisme sebagai praduga teoretis dan teologis sebenarnya mampu hidup berdampingan dengan berbagai perspektif lain.

Definisi utama dari pembahasan mengenai awal mulai ISIS dalam penelitian ini berasal dari ISIS sebagai kelompok terror yang memiliki faham jihadis militant yang berakar pada kelompok Al-Qaeda yang memiliki metode ajaran Salafi-jihadisme yang ekstrem. Melakukan peperangan yang direstui oleh agama adalah pemahaman yang paling dasar mengenai

jihadisme, akan tetapi jihadisme juga digunakan untuk menunjukkan kewajiban untuk berperang melawan individu ataupun kelompok yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan ajaran yang dianutnya, bisa dikatakan kafir. (Hamid and Dar, 2001) Penting untuk diketahui bahwa menurut ajaran Al-Qur'an, bahwa Jihad tidak dimaksudkan untuk digeneralisir menjadi ajakan untuk *Qital* atau berperang akan tetapi jihad juga dapat dimaknai untuk seluruh perbuatan yang memperjuangkan kebaikan. Jihad dilakukan sesuai dengan keadaannya. Jika keadaannya menuntut seorang muslim berperang karena kaum muslim mendapat serangan musuh, maka jhad seperti itu wajib, itupun apabila telah memenuhi syarat dan dievaluasi oleh para Ulama. Namun jika dalam keadaan damai, maka medan jihad sangat luas, yaitu pada semua usaha untuk mewujudkan kebaikan seperti dakwah, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Sangat tidak tepat, selalu memaknai jihad dengan "*qital*" atau "perang", apalagi menggelorakan jihad dalam makna ini dalam keadaan damai. Jihad merupakan kata serapan dari bahasa Arab, memiliki arti "mengerahkan segenap potensi diri untuk melakukan sesuatu". Kata ini dengan berbagai derivasinya, disebut sebanyak 41 kali dalam Al Quran yang semuanya berkonotasi peperangan. Tidak hanya mengenai "peperangan", istilah jihad juga diperkenalkan Rasulullah SAW sebagai sebuah upaya pengendalian diri dari hawa nafsu. Al Quran dan hadits lebih sering menyebut peperangan dengan *Al-Qitaal*, *al Harb*, *al Ma'raakah*, dan *al-Sariyah*. (Majelis Ulama Indonesia, 2019) Dalam Al-Quran dan Hadits banyak terdapat keterangan tentang keutamaan berjihad, etika berjihad, tujuan dan strategi berjihad. Akan tetapi, para penganut ajaran Salafi-Jihadis Ekstrem seperti Al-Qaeda maupun ISIS mengeneralisir bahwa Jihad hanya semata-mata untuk berperang dan halal untuk menumpahkan darah yang dianggap musuh Islam dan Kafir, bahkan sesama muslim pun mereka anggap musuh yang dapat diperangi apabila tidak memiliki keyakinan terhadap ajaran yang sama dengan mereka.

Berangkat dari ajaran inilah, pada tahun 2004, seorang pria kelahiran Yordania yang diberi nama Abu Musab al-Zarqawi menyatakan dirinya sebagai pemimpin cabang Irak dari kelompok teroris Al-Qaeda. Sebelum ia mengambil alih kepemimpinan Al-Qaeda di Irak (AQI), Zarqawi memiliki sejarah keterlibatan multinasional yang Panjang dengan kegiatan teroris. Meskipun sampai saat ini belum ada definisi pasti dari terorisme seperti yang disinggung oleh Prof. Alex Schmid pada saat peneliti mengikuti Pendidikan Singkat atau *Short Course* yang dilaksanakan oleh Universitas Leiden;

“At that time the UN had already for 20 years sought in vain to reach a definition. And, I came up with what I thought was, cutting through the Gordian Knot and saying let's take a definition we all agree on, the one of war crimes and stretch it. So I said an act of terrorism is the peacetime equivalent of a war crime. Because taking of hostages, attacks on civilians, typically things that are of war crimes are also crimes perpetuated by terrorists in peace time however only India accepted that proposal..” (Alex Schmid,2020)

Menurut Prof. Alex Schmid, sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai definisi dari terorisme, bahkan PBB sudah sekitar 20 tahun lebih mendiskusikan mengenai definisi terorisme yang berakhir sia-sia. Bahkan ketika Prof. Schmid mengusulkan definisi dari terorisme, hanya India yang menyetujui usulan definisi teroris tersebut. Maka dari itu untuk mempermudah analisa peneliti dalam penelitian ini akan sepakat dengan definisi terorisme dari Prof. Alex Schmid yang menyatakan bahwa teroris merupakan Tindakan kejahatan dan penyerangan terhadap masyarakat sipil maupun pemerintah serta dapat menimbulkan ketakutan dan intimidasi terhadap khalayak banyak di masa damai. Hal ini tentunya dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Zarqawi dimulai dengan keterlibatannya dalam konflik Soviet dan Afghanistan serta kejahatannya yang dilakukan di Iran, Suriah, Lebanon, dan juga Irak utara yang dikuasai oleh etnis Kurdi.

Meskipun partisipasinya dalam gerakan jihadis Sebagian besar tidak tertandingi di tahun-tahun awalnya, pada tahun 2003 Zarqawi terdaftar sebagai orang kepercayaan atau bisa dikatakan sebagai tangan kanan dari Osama bin Laden, sang pendiri Al-Qaeda. (Wilson Centre, 2019) Adanya intervensi asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada tahun 2003 dan di tahun-tahun berikutnya memberi asupan narasi segar bagi Al-Qaeda tentang perang barat melawan Islam, sehingga menarik dan memberikan dasar bagi organisasi teroris melakukan kegiatan operasional serta berhasil menciptakan musuh bersama umat Islam. Hal tersebut terbukti efektif, dengan Zarqawi mampu menarik simpati Sebagian masyarakat yang merasakan kehancuran dan kerugian akibat invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk bergabung dan menempa mereka menjadi pasukan yang berani mati untuk mengusir pendudukan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di tanah air mereka. Kontroversi dan motif invasi yang selalu dihembuskan oleh Zarqawi lebih bisa dipercaya dan mampu menghasut kerusakan yang lebih mendalam dan terbukti tahan lama selama bertahun-tahun di Irak.(Kirdar, 2011)

Di luar kapasitas Zarqawi sebagai actor individu dan juga memiliki kedekatan dengan Osama bin Laden sebagai pemimpin Al-Qaeda, Zarqawi juga memimpin basis utama operasi Al-Qaeda membuat Zarqawi menjadi sasaran Amerika Serikat dan pasukan koalisi lainnya. Pada awal Juni 2006, hanya berselang dua tahun setelah kelompok itu didirikan dan dia memimpin minoritas Sunni yang tergabung dalam AQI untuk melakukan perlawanan terhadap mayoritas Syiah, Zarqawi kemudian tewas dalam serangan udara Amerika Serikat. Abu Ayyub al-Masri kemudian mengambil alih tampuk kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Zarqawi. Hanya berselang tiga bulan kemudian, al-Masri merubah Al-Qaeda di Irak menjadi Negara Islam di Irak (ISI), dan Abu Omar al-Baghdadi diposisikan sebagai pimpinan dari organisasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, pangaruh dan teritori ISI semakin meluas hingga ke Suriah dan kemudian kelompok ini mengubah nama mereka menjadi negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Kemunculan ISIS di Suriah, sebagian merupakan hasil dari strategi pecah belah terhadap lawan politik yang dilakukan oleh Presiden Bashar al-Assad. Ini tentunya dapat memberikan peluang terbaik untuk ISIS dapat hidup dan mendapatkan legitimasi dari lawan Presiden Bashar al-Assad. (Christoph,2015) Faktor penting lainnya dalam kebangkitan ISIS adalah adanya dukungan dari pemberontak Suriah yang berakhir di tangan yang salah. Pada awal perang saudara Suriah, negara-negara Barat dengan cepat menjatuhkan sanksi kepada rezim Al-Assad dan juga negara-negara sekutu di Timur Tengah (khususnya Turki, Qatar dan juga Arab Saudi) yang membantu menciptakan kekuatan dari oposisi regional. Dampak buruk dari beberapa Tindakan yang diambil, seperti pencabutan embargo minyak oleh Uni Eropa pada April 2013, secara efektif menyebabkan Eropa memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok seperti Jabhat al-Nusra dan Al-Qaeda untuk terus menghembuskan propaganda kepada masyarakat serta oposisi untuk membenci Al-Assad. (Broger, 2013) Semua perkembangan ini membuka jalan bagi Abu Bakr al-Baghdadi untuk memimpin ISIS sejak April 2013 untuk mengkonsolidasikan kendali atas teritori di kedua sisi perbatasan antara Suriah dan Irak. Pada tanggal 29 Juni 2014, ia memproklamasikan ISIS sebagai 'Khilafah' di seluruh dunia. Penyisiran awal ISIS di seluruh wilayah berlangsung cepat, pada tanggal 10 Juni 2014, Mosul direbut hamper tanpa perlawanan. Kurang dari satu setengah tahun kemudian, Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa ISIS merupakan ancaman global dyang belum pernah terjadi sebelumnya bagi perdamaian dan keamanan internasional. (UNSC, 2015) Berikut dibawah ini merupakan tabel mengenai sepak terjang dari ISIS.

Tabel 4.1

Sepak Terjang ISIS

No	Tahun	Bulan/Tanggal	Aksi
----	-------	---------------	------

1	2004	17 Oktober	Kelompok jihadis Abu Musab al Zaraqawi di Irak bersumpah setia kepada al-Qaidah Osama Bin Laden, untuk selanjutnya dikenal sebagai al-Qaidah di Irak (AQI)
2	2006	15 Oktober	Al Masri, penerus Zaraqawi, mengumumkan berdirinya Negara Islam di Irak (ISI), dengan Abu Omar al-Baghdadi sebagai pemimpinnya
3	2009	17 Oktober	Perdana Menteri Irak al-Maliki menargetkan para pemimpin Sunni, termasuk Wakil Presiden Tariq al-Hashimi, yang meningkatkan ketegangan sektarian. Dukungan untuk ISI mulai meningkat di daerah suku Sunni, dan ISI mengklaim bertanggung jawab atas serangan bunuh diri yang menewaskan ratusan orang di Baghdad
4	2013	8 April	Nama Negara Islam di Irak dan Levant (ISIL) dikukuhkan
		Agustus	ISIS menyerang Ahrar-al-Sham dan al-Nusra di sekitar Raqqa
		Desember	ISIS mengambil alih kuasa di Ramadi dan Fallujah.
5	2014	Januari	ISIS mengambil alih Raqqa dan menyatakannya sebagai ibu kota emirat ISIS
		10 Juni	ISIS mengambil alih Mosul, melancarkan serangan terbesarnya hingga saat ini

		29 Juni	ISIS mengumumkan pembentukan kekhalifahan dan mengubah namanya menjadi "Negara Islam / <i>Islamic State</i> "
		7 Agustus	Presiden Obama mengumumkan dimulainya serangan udara terhadap ISIS di Irak untuk membela warga Yazidi yang terdampar di Sinjar.
		19-22 September	ISIS bergerak maju di kota perbatasan Suriah, Kobani, dan mengakibatkan ribuan pengungsi melarikan diri ke Turki
		22 September	Juru bicara ISIS Abu Muhammad al Adnani menyerukan serangan terhadap warga Amerika Serikat, Prancis, dan negara-negara lain dalam koalisi anti-ISIS
6	2015	7 Januari	Dua pria bersenjata, Saïd dan Chérif Kouachi, menyerang kantor surat kabar satir Prancis Charlie Hebdo di Paris, menewaskan 11 orang. Penyerang ketiga, Amedy Coulibaly, melakukan serangan yang disinkronkan di supermarket halal, menyandera dan membunuh empat orang. Coulibaly dilaporkan menyatakan kesetiaan kepada ISIS.
		26 Januari	Pejuang Kurdi, dengan bantuan serangan udara AS dan koalisi, mengusir militan ISIS dari kota perbatasan Suriah, Kobani, setelah pertempuran empat bulan.

		18 Maret	ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan di museum Bardo di Tunis, yang menewaskan 22 orang
		20 Mei	ISIS merebut kota kuno Suriah Palmyra
		21 Mei	Militan ISIS mengambil kendali penuh atas Sirte, Libya - kampung halaman Muammar Qaddafi
		27 Juni	ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan di sebuah resor Tunisia di Sousse, di mana 38 orang tewas dan 39 lainnya luka-luka - kebanyakan dari mereka orang asing
		20 Juli	Seorang pembom bunuh diri yang terkait dengan ISIS menyerang pusat budaya di Suruç - kota perbatasan Turki dekat Kobani - menewaskan lebih dari 30 orang
		30 September	Rusia memulai serangan udara di Suriah. Ia mengklaim menargetkan ISIS, tetapi pejabat AS menuduh bahwa banyak dari serangan itu menargetkan warga sipil dan kelompok pemberontak yang didukung Barat
		15 Oktober	Pasukan Irak merebut kembali kilang Baiji, kilang minyak terbesar di negara itu, dari ISIS
		31 Oktober	Provinsi Sinai, afiliasi ISIS Mesir, mengaku bertanggung jawab atas pemboman pesawat penumpang Rusia

			di atas Semenanjung Sinai, menewaskan al 224 di dalamnya
		12 November	ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan bunuh diri di Beirut yang menewaskan 40 orang
		13 Oktober	ISIS melakukan serangkaian serangan terkoordinasi di Paris, menewaskan 130 orang
7	2016	22 Maret	Tiga ledakan di bandara Zaventem dan stasiun metro di Brussel menewaskan sedikitnya 30 orang dan melukai puluhan lainnya. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu
		27 Maret	Tentara Suriah, dengan dukungan Rusia, merebut kembali Palmyra
		3 Juli	Militan ISIS melakukan pemboman bunuh diri yang menewaskan lebih dari 200 orang di jalan perbelanjaan yang sibuk di Baghdad. Serangan yang terjadi selama bulan suci Ramadhan itu adalah serangan bom ISIS paling mematikan terhadap warga sipil hingga saat ini
		14 Juli	Seorang pria Tunisia berusia 31 tahun mengendarai truk melewati kerumunan di Nice, Prancis, dan membunuh 84 orang. ISIS mengklaim pujian atas serangan itu, meskipun tidak jelas apakah penyerang memiliki hubungan formal dengan kelompok tersebut

		16 Oktober	Kota Dabiq di utara Aleppo secara simbolis direbut oleh pasukan Turki.
		17 Oktober	Pertempuran untuk Mosul telah dimulai
		6 November	Koalisi internasional mulai menyerang Raqqa
8	2017	Desember	Mimpi kelompok “Negara Islam” atau ISIS untuk mendirikan kekhalifahan di Irak dan Suriah pupus. Operasi yang dilakukan dengan gigih di darat oleh gabungan pasukan pemerintah Irak dan pasukan pendukung koalisi di Suriah, yang dikombinasikan dengan kekuatan udara Barat, akhirnya memaksa kelompok teror itu mundur.
9	2018	Desember	Kelompok ISIS mengatakan mereka berada di balik 3.670 serangan di seluruh dunia pada 2018
10	2019	Februari	Rata-rata 11 serangan per hari dan 502 serangan pada dua bulan pertama di tahun 2019, saat Baghuz dikepung.
11	2020	3 Mei	Serangan ISIS di Mukaishefah, 180km di utara ibu kota Baghdad
12	2021	22 Januari	Ibu Kota Irak, Baghdad, diguncang bom bunuh diri terbesar dalam tiga tahun terakhir, menewaskan setidaknya 32 orang

(Sumber: Diolah Peneliti,2020)

4.1.2 Akhir Kejayaan dan Pasca kekalahan ISIS

The Islamic State of Iraq and Syria atau sering disebut dengan ISIS telah diketahui banyak akademisi bahwa kelompok ini memiliki dampak

transformatif secara global. Dalam jangka waktu yang cukup singkat, kelompok ini mampu melebarkan dan mempertahankan kekuasaan atas teritorialnya. Tidak hanya menanamkan rasa takut terhadap masyarakat global melalui serangkaian aksi terror seperti genosida, perampokan, dominasi agama yang salah kaprah, dan juga penghancuran artefak-artefak bersejarah yang tak ternilai harganya karena alasan melanggar syariat agama yang mereka yakini, tetapi juga mereka berhasil menyebabkan gelombang besar migrasi masyarakat di wilayah konflik ke negara-negara di berbagai belahan dunia. Pada Desember 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa;

“the United States has defeated ISIS and orders a “full” and “rapid” withdrawal of US military from Syria” (Donald Trump, 2018)

ISIS berhasil dikalahkan oleh militer Amerika Serikat dan sekutu, Donald Trump juga menyatakan bahwa menarik seluruh pasukannya dari Suriah. (Reuters, 2018) Apabila kita mengesampingkan sejenak mengenai implikasi masa depan dari geopolitik akibat penarikan militer Amerika Serikat, jumlah anggota, kekuatan dan juga teritorial ISIS sudah jelas telah dikurangi secara signifikan, akan tetapi akan justru akan menjadi ancaman bagi komunitas internasional. (Washington Post, 2019) ISIS banyak dipelajari oleh para akademisi dan juga pemerintah di berbagai negara selama bertahun-tahun dan dipercaya akan terus dipelajari di masa mendatang, guna memahami sejauh mana kejahatan yang dilakukan kelompok ini dan bagaimana ISIS berkembang biak begitu cepat. Dalam Sub-bab ini akan dijelaskan mengenai akhir kejayaan ISIS sehingga para *Foreign Fighter* dari berbagai negara yang kemudian menjadi *Returnee* di negara asalnya dapat menjadi ancaman bagi komunitas internasional.

Lebih lanjut, kemungkinan penyebab dari kehancuran dari “kekhalifahan” ala ISIS adalah karena perilaku oportunistik, kaku, dan juga terlalu memaksakan system yang mereka anut seolah-olah melawan arus perkembangan global, belum lagi mereka tidak mengindahkan hukum

internasional yang berlaku tentunya akan menimbulkan gejolak berupa pembelotan baik dari dalam maupun diluar “kekhalifahan” ala ISIS. Jumlah milisi teroris asing yang datang ke Suriah telah berkurang teramat drastic hingga saat ini, dengan hanya sekitar 50 jihadis yang melintasi perbatasan Turki turun dari puncak 2.000 jihadis perbulan. (Griffe,2016) akibatnya, ISIS akan tetap diibaratkan seperti kantong kecil tanpa isis karena negara khalayan buatan ISIS ini berdiri dengan tidak memenuhi syarat pendirian sebuah negara menurut hukum internasional. Para milisi teroris asing yang dulunya berjuang bersama ISIS, saat ini lebih memilih berjuang untuk organisasi lain di lain negara. Seperti contohnya ialah Taliban yang dulu berbai’at kepada ISIS dan mendukung perjuangan ISIS, saat ini Taliban Kembali bertahan di Pakistan, atau juga sisa-sisa milisi teroris asing ISIS akan kembali menjadi kelompok teroris jihadis “klasik” dan memilih negara lain untuk beroperasi, adanya perpecahan dalam internal ISIS ini menyebabkan kemunduran dari segala aksi ISIS. (Cammak, 2016)

Strategi Amerika Serikat dan koalisi dalam melemahkan ISIS lebih difokuskan pada pelemahan daripada menghancurkan, secara praktis tentu akan mengakibatkan ISIS ataupun pecahan dari organisasi tersebut akan suatu saat timbul kembali ke permukaan. Akhir kejayaan ISIS tentu akan menimbulkan suatu konsekuensi yang serius bagi komunitas internasional. Konsekuensi tersebut yaitu pertama, seperti yang telah disebutkan oleh peneliti sebelumnya bahwa pecahan-pecahan dari ISIS akan mencoba mengaktifkan Kembali sel di luar wilayah konflik sebelumnya. Telah peneliti singgung sebelumnya bahwa mantan juru bicara ISIS yaitu al-Adnani pernah menyatakan bahwa;

“If you are unable to travel to the Levant (Syria), then fight the apostate armies in your country... Brothers, go out with a knife, whatever is needed, attack them, kill them en masse...”.
(Adnani,Reuters, 2016)

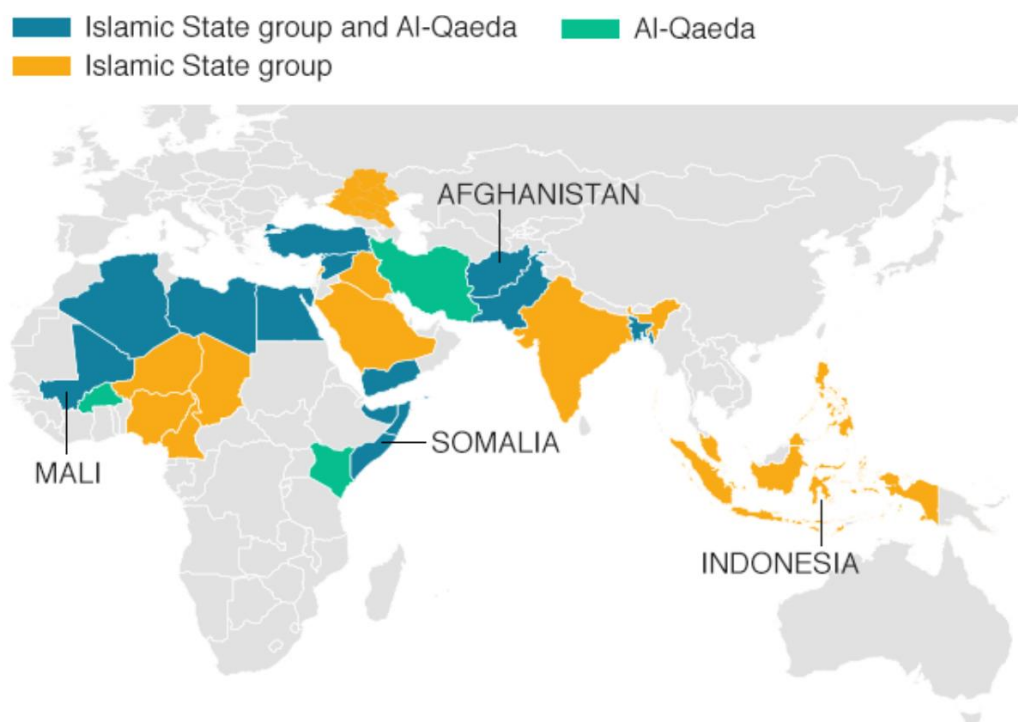
lalu diperjelas dalam tulisan Kalin Stephen dan Ahmed Tolba (Reuters,2016)

“One, an organization finding itself in its last throes is more likely to lash out and to activate cells outside its own territory. Former ISIS spokesman al-Adnani made just such a call back in July 2016.” (Reuters,2016)

Al-Adnani menyerukan kepada pengikut ISIS di seluruh dunia bahwa lakukanlah penyerangan atau lakukan pembunuhan dan aktifkan sel yang berada di luar wilayah konflik. Kedua, ISIS telah mengadopsi strategi bumi hangus dari semua wilayah kekuasaan mereka apabila suatu saat mereka terdesak dan terpaksa kekuasaannya runtuh, hal ini dilakukan agar timbul korban sebanyak mungkin dan sumber daya yang mereka peroleh tidak lagi bisa digunakan oleh siapapun. (Schwartzstein,2016) Ketiga, kekalahan ISIS dapat mendorong miisi teroris asing dan juga asli dari Suriah dan Irak untuk berpindah ke wilayah lain, misalnya yang peneliti soroti ialah banyaknya milisi teroris asing asal Indonesia yang berangkat ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS tentunya ketika mereka telah kembali (returnee/returnis) akan menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan nasional. Returnis ISIS yang sudah ada di tanah air akan mencoba menimbulkan ancaman sosial-politik jika mereka berhasil mengeksploitasi ketegangan sosial.

Dari penjelasan mengenai akhir dari kejayaan ISIS di atas, diketahui bahwa ancaman tetap saja ada. Bahkan, Komandan tertinggi militer AS di Timur Tengah telah memperingatkan pentingnya mempertahankan kewaspadaan terhadap segala bentuk serangan oleh kelompok yang mempertahankan para pemimpin, pejuang, fasilitator, sumber daya, dan ideologi ekstrem yang mereka anut. Di Irak, kelompok itu telah berkembang menjadi jaringan rahasia. PBB mengatakan sel-sel tidur yang aktif di daerah pedesaan berusaha melakukan pemberontakan dan melakukan pelemahan terhadap otoritas pemerintah, melakukan pelanggaran hukum, dan melakukan tindakan sabotase terhadap kepentingan negara. ISIS memang telah menderita kerugian besar, tetapi PBB mengatakan pihaknya masih mengontrol antara 14.000 dan 18.000 militan di Irak dan Suriah

termasuk milisi teroris asing dari Indonesia yang masih berada disana. (BBC,2018) Ditambah lagi, terdapat sejumlah besar milisi teroris asing yang berafiliasi dengan ISIS di Afghanistan, Mesir, Libya, Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Afrika Barat. Individu yang diilhami oleh ideologi kelompok tersebut juga terus melakukan serangan di tempat lain. Berikut peneliti sajikan peta penyebaran ISIS di dunia berdasarkan laporan intelijen Amerika Serikat pada tahun 2018.



Gambar 4.1

Peta Persebaran Milisi Teroris Asing yang berafiliasi dengan ISIS

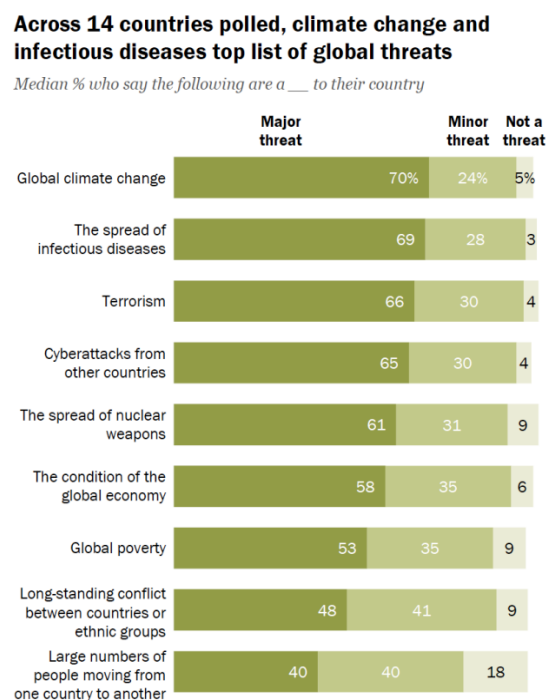
(Sumber: BBC,2018)

Dapat dilihat dari peta persebaran milisi teroris asing di dunia, bahwa Indonesia merupakan tempat sasaran bagi teroris ISIS untuk melakukan kegiatan “amaliyah”nya. Indonesia dikabarkan sebagai “*safe heaven*” bagi para milisi teroris asing. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ISIS memiliki ideologi jihadis-salafi ekstrem dan penganut Islam Sunni, sedangkan Indonesia juga mayoritas penganut Islam yang beraliran

Sunni. Sehingga telah membuat para pengikut ISIS/IS melihat Indonesia sebagai target yang diimpikan (ideal) untuk diubah menjadi pengikut, atau salah satu provinsi kekhalifahan yang telah dideklarasikan di Suriah dan menjadikan Indonesia sebagai *safe heaven* atau tempat yang mereka anggap aman bagi ISIS.

4.1.3 Milisi Teroris Asing dan Upaya Menggeser Konflik ke Indonesia

Sebuah survei dari Pew Global yang diterbitkan pada 3 September tahun 2020 (Pew Global, 2020) menemukan bahwa rasa takut akan serangan teroris menduduki peringkat ketiga dalam permasalahan global, tepat di atas ancaman perang nuklir.



Grafik 4.1

Daftar Ancaman Global

(Sumber: PewGlobal, 2020)

Berdasarkan grafik diatas, tentunya menggambarkan bahwa komunitas internasional masih mempunyai rasa takut yang cukup tinggi terhadap serangan teror, apalagi menurut survei yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2017, ketika ISIS berada di ambang kehancurannya yang mengakibatkan para milisi teroris asing yang beraksi di Suriah dan Irak terpaksa Kembali ke negara asalnya masing-masing. Tentunya hal tersebut memicu ketakutan dan kewaspadaan setiap negara di dunia, rasa takut terhadap serangan teroris berada di puncak grafik ancaman global, tepat di atas permasalahan mengenai perubahan iklim. Fakta bahwa ancaman dari kelompok marjinal dan terdiri dari beberapa ribu anggota (Newyorker, 2017) dapat mengkhawatirkan lebih banyak orang.

Meskipun kekhalifahan teritorial ISIS telah terpukul mundur dan kekuatannya menjadi terpecah, kekhawatiran bahwa ISIS dapat tetap bertahan dalam jangka Panjang, baik sebagai kelompok maupun sebagai inspirasi bagi individu lain tetap saja ada bahkan terus berlanjut. Sebagian besar karena pengaruh ISIS sudah terdoktrin dan merasuk ke dalam pikiran mereka sehingga berhasil menari rekrutan baru dari berbagai negara. Orang-orang tidak hanya berbondong-bondong untuk bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah, tetapi juga dengan sukarela melakukan kegiatan "Amaliyah"nya di negara-negara asalnya, atau sering disebut dengan "*Lone Wolf*", mereka yang melakukan kegiatan amaliyah di negara-negara asalnya ini merupakan *Splinter Cell* atau sel terputus dari kelompok teror ISIS yang melibatkan perempuan dan anak yang bertatus sebagai deportan maupun milisi teroris asing. (BIN,2019) Sehingga, kemampuan dari perempuan dan anak juga patut diwaspadai, tidak serta merta mereka dianggap tidak akan menimbulkan ancaman hanya karena masalah gender dan juga status anak kecil saja. Namun, mereka juga memiliki tingkat ancaman yang cukup berbahaya juga. Lebih lanjut, banyak rekrutan asing yang tampaknya telah bergabung dengan ISIS sebagai reaksi terhadap kondisi dalam negeri yang terus menerus terdapat masalah yang tak kunjung usai, mereka menanggapi pemerintahan telah gagal dalam

mengatasi permasalahan sosial, ekonomi maupun adanya dugaan diskriminasi terhadap kepercayaan mereka sehingga menuduh pemerintahan telah zolim, bahkan menyebut pemerintah sebagai “*Thogut* (طاغوت)” sehingga layak untuk berjihad menurut versi mereka. (UN,2017) Selain itu, banyak juga faktor lain yang mendorong mereka bergabung dengan ISIS, namun secara lengkap akan dijelaskan dalam sub bab pembahasan dan hasil penelitian.

Kemudian, ISIS bukan satu-satunya kelompok teroris brutal yang menawarkan solusi yang tidak menyenangkan untuk mengatasi permasalahan yang kompleks di lingkungan strategis global, hal ini telah lebih dahulu dilakukan oleh Al-Qaeda. Kelompok-kelompok teroris seringkali mempromosikan alternatif yang dianggap terampil dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dimana masyarakat yang mengalami kekecewaan yang mendalam dengan kondisi politik dan sosial serta berujung pada ketidakpercayaan terhadap institusi negara, ditambah lagi dengan kemudahan terhadap akses internet yang hal ini tentunya memungkinkan perluasan jangkauan daya tarik terhadap siapapun bahkan dapat melampaui wilayah asalnya. Sebenarnya masih menjadi perdebatan mengenai motivasi orang-orang untuk berangkat (berhijrah) dari negara asalnya ke Suriah dan Irak, ada banyak faktor mereka berangkat, akan tetapi peneliti saat ini sependapat dengan pandangan dari bapak Nasir Abbas yang menyatakan bahwa faktor ideologi merupakan motivasi mereka pergi berhijrah dari Indonesia. Lebih lanjut, sejalan dengan pendapat bapak Nasir Abbas, peneliti menyoroti pendapat dari Prof. Edwin Bakker ketika peneliti mengikuti kelas singkat dari Universitas Leiden, Beliau menyatakan bahwa;

“...many fight for what they believe is their right and duty to help people. That brings me to the second category; the religious motivation. Some don't just mention women and children that need help, but they say, I do this to protect, to protect these people and that is my religious duty. And from a religious perspective, my duty is to protect the Ummah, the community of

believers, the women and children and others in Syria that are Muslim. Add to that the idea to be part of the establishment of an ideal state based on religion, under Sharia law that is linked to the concept of a caliphate, a new Islamic, large Islamic State for all Muslims that covers the entire Muslim world...” (Prof. Edwin Bakker,2020)

Dijelaskan bahwa banyak dari milisi teroris asing berhijrah ke Suriah dan Irak ialah salahsatunya karena faktor keagamaan (ideologi), mereka beranggapan dengan melakukan hijrah maka itu merupakan suatu tanggungjawab melindungi sesama umat muslim, mereka juga berpendapat bahwa khilafah yang didirikan oleh ISIS merupakan sesuatu bentuk pemerintahan yang ideal sehingga harus diperjuangkan, dan hal tersebut sudah jelas tertera dalam kitab suci. Akan tetapi, sudah jelas bahwa hal tersebut hanyalah propaganda ekstrem yang dilakukan oleh ISIS untuk menari simpati muslim. Jelas terbukti dengan lebih dari 40.000 warga negara asing yang berbondong-bondong untuk bergabung dengan ISIS dan itu terdiri dari 110 negara, baik itu sebelum maupun setelah deklarasi kekhalifahan ala ISIS pada bulan Juni 2014.(McGurk,2017)

Lebih lanjut, menurut Progress America bahwa terdapat 12 negara yang telah menyumbangkan milisi teroris asing ke Suriah dan Irak dengan proporsi mencapai 75 persen dari total seluruh MTA yang masuk ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS (Progress, Center for American,2016 dalam Didik N Rahmanto,2020) diantara 12 negara tersebut, Indonesia termasuk salahsatu negara yang menjadi penyumbang MTA dalam jumlah yang cukup banyak. Sejumlah laporan lain menyebutkan bahwa selama berada di Irak dan Suriah, seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa milisi teroris asing ini mempunyai peranan penting dalam terjadinya teror di Suriah dan Irak. Para milisi teroris asing ini dianggap lebih mampu melakukan kebrutalan daripada milisi local. Salahsatu faktor yang membuat MTA lebih kejam adalah fakta bahwa mereka tidak memiliki suatu ikatan apapun dengan penduduk local. ISIS tahu betul akan adanya potensi

tersebut, itu sebabnya mereka kerap memanfaatkan MTA untuk melakukan aksi teror ke negara-negara sasaran ISIS.

Salahsatu kasus ialah pengeboman 3 Gereja di Surabaya pada tahun 2018 oleh keluarga yang baru pulang dari Suriah. Keluarga Dita Oepriarto merupakan satu dari 500-an keluarga yang baru pulang dari Suriah, kedatangan keluarga teroris dari Suriah ini diduga masuk ke Indonesia tanpa terawasi pemerintah. Ketiadaan pengawasan ini membuat deteksi terhadap terorisme menjadi lemah. Lebih lanjut, berdasarkan pernyataan dari Direktur Kontra Terorisme, Badan Intelijen Negara "*Sejak tahun 2015 sampai Oktober 2019, tercatat 699 orang WNI dideportasi dari berbagai negara, 483 orang berasal dari Turki dan Irak karena berupaya masuk ke Suriah, sedangkan 216 orang merupakan TKI yang terpapar radikalisme*" (BIN,2021) Hal ini semakin menegaskan bahwa MTA dan juga para Returnis ISIS merupakan suatu ancaman yang nyata bagi stabilitas keamanan nasional, karena mereka berusaha untuk menggeserkan konflik ke Indonesia dengan berbekal kemampuan yang dimiliki selama menjadi MTA di Suriah maupun Irak.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Ancaman yang Dapat Ditimbulkan Oleh Returnis ISIS Terhadap Keamanan Nasional Indonesia

Ancaman yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah merujuk pada aksi-aksi kekerasan yang biadab, cenderung acak dalam memilih korbannya bahkan justru bertujuan menimbulkan ketakutan hebat terhadap masyarakat luas yang bukan korban secara langsung terkena dampak dari aksinya, dengan tujuan akhirnya adalah gejolak politik dan sosial yang berujung konflik di tengah masyarakat serta agar pihak lain mengikuti keinginan dari para pelaku teror yang rata-rata ditimbulkan oleh pengikut ISIS dan sebagian besar dari mereka ialah yang pernah berjuang di Suriah

dan Irak maupun negara lain seperti Afghanistan yang kemudian disebut dengan Returnis ISIS. Returnis ISIS ini memiliki beragam latar belakang, lintas etnik, ras dan juga beragam motivasi sehingga mereka bisa dengan keyakinan yang penuh untuk berangkat ke negara lain untuk bergabung dengan ISIS. Lebih lanjut, para returnis ISIS ini dapat dikategorikan sebagai milisi teroris asing yang dalam modus operannya, aksi-aksi terorisme bisa dilakukan berkelompok oleh orang-orang dengan kewarganegaraan lintasnegara, ataupun seorang diri saja. Yang jelas, aksi-aksi kekerasan yang brutal dengan korban yang maksimal selalu berusaha dicapai para pelakunya, dengan tujuan pula dapat meraih perhatian yang besar demi sukses kampanye radikalisme dan tujuan aksi-aksi terorisme yang dilakukan pelakunya. Sementara, terminologi internasional mendeskripsikan bahwa aksi-aksi terorisme yang dilakukan, sasaran, termasuk pula pengikut, pendukung dan simpatisannya terorisme, dan tujuan pelakunya tidak mengenal batas atau entitas negara. Walaupun entitas negara masih digunakan, itu dalam makna sementara, yang tidak lagi sempit, namun pada akhirnya dalam perspektif sejagat (mondial).

ISIS/IS, dengan aksi-aksi terorisme internasional yang dilakukannya selama ini, telah dikategorikan sebagai salah kelompok teroris internasional. Dengan nama dan identitas lainnya yang melekat dengan organisasinya, seperti bendera, latarbelakang para pelakunya, dan terutama tujuan akhir yang hendak diwujudkannya, ISIS/IS telah dikategorikan sebagai kelompok fundamentalis dan radikal agama yang ingin memperjuangkan berdirinya "Kekhalifahan Islam" sejagat dengan cara dan menargetkan sasaran apapun, sebagaimana yang dijustifikasi oleh para pelaku terorisme. Organisasi dan segala kegiatannya bersifat bawah tanah, sehingga pergerakannya sangat rahasia, sulit dilacak. Ia merupakan organisasi *clandestine* atau *tanzim siri*, yang eksistensi atau keberadaannya tidak banyak diketahui dan dipercaya orang (publik). Oleh karena itu, para pengikut, pendukung, dan simpatisannya memang layak disebut sebagai bagian dari sebuah organisasi teroris internasional.

4.2.1.1 Ancaman terhadap Keamanan Nasional

Milisi teroris asing asal Indonesia dikabarkan memiliki jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan negara-negara asia tenggara lain, mereka bergabung dengan ISIS di berbagai wilayah konflik dengan salahsatu tujuannya ialah untuk melawan musuh Islam dan mempertahankan apa yang mereka sebut dengan khilafah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa justru milisi teroris asing terkenal brutal dan tidak segan-segan untuk membunuh yang dianggap musuh bagi mereka, termasuk milisi teroris asing asal Indonesia. Sepak terjang ISIS di wilayah-wilayah yang di klaim olehnya menyebabkan berbagai negara di dunia mulai melihat bahwa milisi teroris asing sebagai ancaman bagi negara asal mereka. Sehingga, dari poin itu saja sudah bisa menggambarkan betapa tinggi nya ancaman yang akan ditimbulkan apabila para milisi teroris asing asal Indonesia ini kembali ke tanah air sebagai returnis ISIS.

Berdasarkan data dan fakta dari berbagai sumber literatur dan akademisi sepakat bahwa banyak yang berstatus sebagai jihadis atau milisi teroris asing maupun simpatisan diajarkan mengenai berbagai keterampilan, taktik dan ide untuk berperang yang kemudian mereka gunakan dalam medan pertempuran, contohnya saja di Suriah. Di kamp pelatihan ISIS di irak dan Afghanistan, milisi teroris asing diperkuat pengetahuannya dalam pertempuran, mereka juga belajar bagaimana membuat alat peledak yang telah di kembangkan (*improvised explosive devices* (IEDs)) yang semakin canggih, mereka juga mengembangkan taktik pembunuhan yang efektif dan juga mereka diajarkan mengenai pengetahuan tentang bom bunuh diri. (Shinn dalam Danyl, 2015)

Para milisi teroris asing yang telah kembali ke negara asalnya mereka juga membangun jaringan, mereka dengan mudah mendapatkan kontak dari luar wilayah dan negara asal mereka dan menyiapkan suatu rencana untuk melakukan aksi teror di masa mendatang. Seringkali milisi

teroris asing ini dikategorikan sebagai potensi ancaman laten oleh banyak kalangan akademisi yang mengkaji terorisme. Contoh saja di Arab Saudi, mereka yang telah “pensiun” setelah bertempur pada tahun 1990-an di Afghanistan kemudian dimobilisasi oleh Al-Qaeda di Semenanjung Arab dan melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2003. (Heghammer,2006) Tindakan bom bunuh diri (*Suicide Bombing*) dan pemenggalan kepada tawanan mereka merupakan suatu taktik yang telah dipelajari dan di implementasikan ketika mereka di Suriah, Irak maupun Afghanistan dan bukan suatu hal yang mustahil mereka yang kembali ke tanah air akan melakukan hal yang sama karena mereka masih menganggap Indonesia merupakan negara *Toghut* yang harus mereka perangi dan bahkan menjadikan tindakan yang mereka lakukan akan mendapatkan kesan spiritual berupa pahala dan Surga. Orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka akan mereka perangi karena bagi mereka, orang-orang yang tidak sepaham tersebut merupakan kafir.

Milisi teroris asing ISIS sering digunakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Irak setelah invasi Amerika Serikat, karena mereka tidak mempunyai ikatan apapun dengan korban di Irak. Militer Amerika Serikat menemukan fakta bahwa milisi teroris asing termasuk Indonesia melakukan sekitar 90 persen serangan bunuh diri di Irak. (Felter,2008) Hal tersebut kemudian terbukti dengan pada tahun 2018 keluarga yang menurut data baru pulang dari Suriah dan diketahui merupakan milisi teroris asing ISIS melakukan aksi bom bunuh diri di Surabaya. Lalu, ISIS juga seringkali menggunakan perempuan dan anak sebagai senjatanya, pada pertempuran di Mosul Irak pada tahun 2016, pelaku bom bunuh diri Sebagian besar merupakan perempuan (BBC,2016) dan anak-anak bahkan di rentang usia 8-15 tahun dijadikan sebagai tentara anak. (Mahmood,2016) Hal ini semakin membuktikan bahwa milisi teroris asing meskipun mereka perempuan ataupun anak kecil sekalipun merupakan ancaman terhadap keamanan nasional yang serius dan tidak boleh diremehkan.

Returnis ISIS yang masih terkait dengan kelompok teroris internasional seperti ISIS sering memperkeruh keadaan di negara asalnya, mereka yang berhasil kembali akan mencoba meningkatkan kemampuan mereka dalam berperang. (Heghammer,2017) ISIS terus melatih para milisi teroris asing untuk melakukan serangkaian operasi teror seperti pembunuhan dan pemboman, siapa melakukan apa sangat bergantung pada kebangsaan asal dan pengalaman sebelumnya, termasuk milisi teroris asing asal Indonesia mendapatkan peranan penting di Irak dan Suriah. Kemampuan taktis dan juga keahlian dalam bidang teknologi yang mereka kuasai juga menjadi fokus dalam melihat ancaman yang akan ditimbulkan oleh returnis ISIS. Mereka memanfaatkan jejaring internet untuk menyebarkan paham dan juga propaganda mereka kepada seluruh dunia, di Indonesia sendiri saat ini mayoritas masyarakat sedang dengan massif menggunakan internet karena tuntutan pekerjaan dan pendidikan yang dilakukan di rumah akibat masih meningkatnya kasus Covid-19, hal ini tentunya dimanfaatkan para returnis ISIS untuk menyebarkan konten-konten propaganda mereka, mereka menggunakan berbagai platform baik media sosial maupun website.

Lebih lanjut, dapat dikatakan perubahan yang paling penting akan tetapi paling sulit untuk diukur adalah adanya perubahan pola pikir manusia. Mereka datang ke zona konflik karena berbagai alasan, mulai dari rasa ingin tahu yang tinggi hingga keinginan untuk melindungi sesama muslim. Akan tetapi, perlu diingat bahwa saat mereka berada di zona konflik, mereka akan mempelajari ide-ide baru dan secara alamiah sudah terdoktrin ideologi ISIS. Bukan suatu yang aneh apabila para milisi teroris asing yang kembali ke tanah air menjadi seorang returnis akan memandang suatu permasalahan secara berbeda ketika mereka ada di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, milisi teroris asing asal Al-Jazair yang kembali dari Afghanistan mulai memandang pemerintah mereka sendiri sebagai rezim "kafir" yang didukung Uni Soviet yang mereka perangi di Afghanistan. (Pham,2011) Demikian pula dengan kelompok teroris Maroko yang

didirikan di Afghanistan pada tahun 2000 dan mereka menerima pelatihan serta indoktrinasi dari Al-Qaeda sebelum melakukan beberapa serangan berdarah di Maroko pada tahun 2003. (Palmer,2016) Begitupula dengan Indonesia, para milisi teroris asing yang kembali ke tanah air menjadi seorang returnis yang pada dasarnya menganggap pemerintah merupakan rezim kafir akan sangat mungkin melakukan Tindakan terorisme dan akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, bahwa ISIS mempunyai aliran salafi-jihadis ekstrem dan mengadopsi ideologi takfiri (تكفيري), dimana ideologi ini merupakan suatu jenis jihadisme yang sangat tidak toleran dan siapapun yang tidak mengikuti keyakinan dan praktik Islam yang “benar” menurut mereka akan dicap murtad dan kafir sehingga karenanya halal untuk dijatuhi hukuman mati. Meskipun organisasi cikal bakal ISIS yaitu Al-Qaeda sendiri Sebagian besar menentang agenda takfiri, ISIS dan sebagian pengikut Al-Qaeda tetap berpegang pada keyakinan dari ideologi takfiri tersebut. Mereka terbukti bersedia dengan sukarela untuk membantai warga sipil yang tidak berpihak pada mereka, dengan alasan bahwa kenetralan orang lain selain daripada mereka adalah bentuk dari murtad dan telah jatuh dari iman yang “benar”. (Pham,2009) Irak dibawah kendali ISIS merupakan sarang pemikiran dari Takfiri, secara umum musuh mereka identifikasikan menurut garis agama, bukan garis nasional atau geografis. Karena ketika contohnya saja ketika milisi teroris asing asal Indonesia yang kembali dari Irak dan Suriah atau Afghanistan akan berusaha menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk berperang.

Mereka yang kembali berpotensi memiliki agenda global, melihat para milisi teroris asing seringkali berpindah dari konflik ke konflik lainnya. Banyak hal bergantung pada konflik mana yang sedang “panas-panasnya”. Banyak milisi teroris asing yang bertempur di Suriah bergabung dalam perjuangan di Irak, mereka merupakan veteran perang jihadis masa lalu bersama dengan Al-Qaeda. Ada juga beberapa dari mereka sebelumn

menjadi milisi teroris asing sudah pernah mencoba melakukan serangan di negara asalnya namun gagal sehingga menggunakan pertempuran di luar negeri untuk meningkatkan legitimasi mereka. Penelitian dari Frank dengan judul "*Foreign Fighters: Trends, Trajectories & Conflict Zones*" menjelaskan bahwa para milisi teroris asing seringkali menjadi inspirasi, sebagai jembatan dan memberikan berbagai pemahaman radikal kepada anggota baru untuk bergabung dalam suatu pertempuran. (Frank,2010) Selain itu, milisi teroris asing yang kembali juga seringkali menjadi penghubung utama bagi calon pejuang untuk mencari cara untuk melakukan jihad. (Felter,2016) Platform media sosial memainkan peranan penting, seperti Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, hingga Twitter pun semuanya digunakan para jihadis untuk memobilisasi pengikut. Salahsatu platform yang mainstream dan seringkali peneliti dapati para simpatisan ISIS dan juga kelompok-kelompok ekstrem yang memperjuangkan khilafah yaitu Instagram. Berikut peneliti sajikan salahsatu contoh tangkapan layer dari akun Instagram yang gencar mempromosikan khilafah dan bahkan memplintir sejarah nusantara.

Dengan adanya akun yang menyebarkan faham-faham ekstrem yang bahkan tidak ragu untuk memplintir sejarah Indonesia, tentu banyak masyarakat yang akhirnya menjadi salah kaprah terhadap sejarah bangsa yang sebenarnya dan akan menimbulkan persepsi yang salah sehingga tentunya akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Cara tersebut telah digunakan di seluruh dunia serta memainkan peranan yang sangat berpengaruh dalam konfli Suriah, cara tersebut merupakan cara yang paling ampuh dalam memicu konflik antar masyarakat bahkan menimbulkan perang saudara. (Lynch,2014) Media sosial memungkinkan penyebaran cepat ide-ide jihadis melalui berbagai konten, seperti Khotbah, Video kekerasan, sejarah yang dipelintir, hingga bentuk propaganda lainnya yang digunakan untuk memotivasi pendukungnya. (Carter,2014) Kelompok seperti ISIS sangat terampil menggunakan media sosial untuk membentuk citra dan merekrut calon pejuangnya, mereka mengemas

sedemikian rupa mengenai konsep khilafah agar lebih mudah dipahami dan dicerna oleh banyak kalangan. Para simpatisan ISIS biasanya dalam berinteraksi sosial di keluarganya akan mencoba untuk bertingkah seolah-olah paham agama akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan ajaran agama islam sesungguhnya yang mengajarkan perdamaian, mereka cenderung memaksakan kehendak dan gampang mengkafirkan orang lain karena merasa mereka mempunyai ilmu agama yang mumpuni dan mereka ingin terlihat keren karena seringkali berpenampilan paling agamis dan gemar memposting hal-hal mengenai keutamaan jihad dengan cara berperang terhadap kezaliman pemerintah. Dengan begitu dapat diketahui bahwa para milisi teroris asing yang kembali ke tanah air sebagai returnis jelas merupakan sebuah ancaman yang nyata terhadap keamanan nasional dengan berbagai cara.

4.2.1.2 ISIS di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk penganut Islam terbesar di dunia, dengan mayoritas pengikut Sunni. Adapun ISIS dan pengikutnya adalah penganut Islam Sunni, dari kalangan Salafi, yang jauh lebih keras, fundamentalis, dan berbeda dari Wahabi, yang penganutnya banyak terdapat di Arab Saudi, yang selama ini dikenal konservatif. (Nainggolan,2017) Namun, ajaran Wahabi-Salafi telah diajarkan dan disebarluaskan luas oleh Arab Saudi melalui berbagai bentuk bantuan keuangan ke berbagai institusi pendidikan sejak tahun 1970,(Saleem,2016) antara lain mengalir ke LIPIA. Penjelasan inilah yang melatarbelakangi mengapa telah muncul simpatisan atau mereka yang terlibat jejaring terorisme, yang berasal dari institusi pendidikan yang telah menerima bantuan keuangan dari Arab Saudi. Bertahannya negeri ini mempertahankan ideologi nasional tidak menurut basis agama yang dominan, dengan berbagai potensi yang dimilikinya, terutama perannya sebagai kekuatan ekonomi besar di kawasan, telah membuat para pengikut ISIS/IS melihat Indonesia sebagai target yang diimpikan (ideal) untuk

diubah menjadi pengikut, atau salah satu provinsi kekhalifahan yang telah dideklarasikan di Suriah.(The Jakarta Post,2016) Hal ini telah menjadi perhatian tokoh Islam di Indonesia, seperti Said Agil Siradj, Ketua Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar, sehingga ia telah mengkritisi keberadaan bantuan pendidikan asal Arab Saudi yang besar dalam jangka panjang dan implikasinya atas meningkatnya paham radikal dan pemikiran Islam yang konservatif, di kalangan mahasiswa universitas-universitas Islam yang menerima bantuan. Keprihatinan serupa telah muncul sebelumnya dari para pemimpin Barat, yang sangat khawatir dengan peran dinasti monarki Arab Saudi, yang dinilai berkepentingan untuk mempertahankan eksistensinya dengan mengalirkan bantuan keuangan ke sektorsektor pendidikan berbagai negara, terutama Pakistan dan Indonesia, untuk mengembangkan aliran Wahabi mereka.

Aspirasi pengadopsian syariah Islam di Indonesia yang belum berhasil diwujudkan sejak gagalnya Piagam Jakarta tahun 1945 turut memainkan peranan mengapa gerakan penegakan khilafah memperoleh dukungan, bahkan ketika ISIS/IS baru dideklarasikan, dengan adanya kelompok yang mengusung bendera ISIS/IS dalam aksi unjuk rasa tertentu. Pertama kali bendera ISIS/IS diusung oleh kelompok kecil orang-orang yang turut melakukan demonstrasi mendukung Palestina atas tindakan agresi brutal Israel di Gaza, yang sedang digelar di Bundaran HI. Laporan warga di Cempaka Putih mengungkapkan berkibarnya bendera ISIS/IS secara bebas di dekat fasilitas publik, yakni pasar terbuka dan sekolah, tanpa ada berbagai upaya aparat keamanan menurunkannya. Sementara, ironisnya, ISIS/IS di Suriah dan Irak sampai saat ini, dapat dikatakan, belum menunjukkan responsnya terhadap perilaku kekerasan Israel di Gaza, berbeda dengan Hezbollah, yang merupakan pengikut aliran Syiah pro-Iran di Lebanon, yang selalu bersikap keras terhadap Israel, tidak hanya terhadap politik zionismenya.

Penghargaan yang tinggi terhadap kemajemukan di masyarakat Indonesia juga memberi alasan dan sekaligus peluang ISIS/IS untuk mengembangkan ideologi dan menanamkan pengaruh dan mencari pengikutnya lebih luas di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi di Irak, Suriah, Yaman, Libya, dan negara-negara Timur-tengah lainnya, mereka berkepentingan untuk menentang toleransi atas hidup dan berkembangnya pengaruh aliran Syiah di Indonesia. Perkembangan ini juga sebagai konsekuensi dari meluas dampak proxy war di TimurTengah, antara negara-negara besar penganut Sunni dan Syiah, atau antara Saudi Arabia versus Iran.

Dalam kenyataannya, radikalisasi identitas agama di Indonesia sesungguhnya lebih besar dipengaruhi kontestasi politik yang terjadi di luar Indonesia dibandingkan oleh orientasi keagamaan di tingkat domestik (internal). Diakui secara umum, walaupun terdapat perbedaan ajaran teologis antara Sunni dan Syiah, namun diakui mereka dapat direkonsiliasi dan didamaikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi, diingatkan Sirry, jika motivasi keagamaan berinteraksi dengan konteks politik, budaya toleransi masyarakat kita (Indonesia) berada dalam ancaman serius.(Sirry,2015)

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami mengapa semangat antiSyiah di tanah air tampak meningkat drastis belakangan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ketika kampanye ideologi dan propaganda gerakan ISIS/IS belum muncul dan berkembang luas di masyarakat. Kondisi ini yang menjelaskan mengapa terjadi penolakan terhadap kelompok Syiah untuk kembali ke tempat tinggal mereka semula pasca-insiden 2013 di Sampang, Madura, yang telah menyebabkan dua orang tewas. Begitu pula, realitas ini yang dapat menjelaskan mengapa berbagai selebaran (pamflet) anti-Syiah yang bermunculan di berbagai daerah, bahkan Yogyakarta, kota pelajar yang selama ini dikenal sebagai kota yang sangat toleran terhadap kemajemukan atau perbedaan. Kota ini kemudian

telah berubah menjadi tempat berkembang dan meningkatnya ancaman terhadap para pengikut Syiah. Demikian pula, toleransi yang tinggi dalam negara berasas Pancasila terhadap kelompok minoritas lainnya, seperti Kristen dan Katolik, yang pada umumnya hidup dengan kondisi ekonomi yang jauh lebih baik, membuat para pengikut dan simpatisan ISIS/IS melihat Indonesia sebagai lahan subur mereka untuk berkembang dan menjalankan memperkenalkan ideologi dan aktivitas radikal mereka.

Kembalinya para pengikut dan aktivis ISIS/IS dari TimurTengah menimbulkan kekuatiran terhadap peran dan pengaruh mereka di tengah-tengah masyarakat setelah mereka berintegrasi dengan penduduk lokal, wilayah mereka tinggal kemudian. Kekhawatiran ini beralasan mengingat mereka yang kembali dari berjihad, terutama di Suriah dan Irak, akhir-akhir ini telah tinggal menyebar dan bergabung dengan penduduk setempat di berbagai lokasi antara lain di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Aparat keamanan khawatir terhadap upaya mereka dalam menyebarkan ajaran radikal melalui acara-acara keagamaan kepada lapisan luas masyarakat, terutama kalangan bawah yang terpinggirkan akibat terisih secara ekonomi dan sosial. Mereka sangat rawan terhadap berbagai bujukan untuk melakukan aksi-aksi terorisme dalam bentuk penculikan, penembakan, pengeboman, dan lain-lain di tempat-tempat publik, seperti bandara, pasar, mal, stasiun, pelabuhan, serta tempat-tempat lain lokasi banyak orang berkumpul.

Laporan media Australia (*Australian Broadcasting/ABC*) mengungkapkan, 5 masjid di Jakarta telah dijadikan tempat propaganda ISIS, salah satunya Masjid Al-Syuhada. Laporan ini mengejutkan mengingat bagi netizen di media sosial, apalagi masyarakat Indonesia pada umumnya, sebab baik BIN, Polri, maupun BNPT, belum pernah me-release laporan seperti ini. Kesimpulan tersebut tampaknya dibuat dengan kehadiran wartawan ABC dalam ceramah-ceramah di kelima mesjid itu. Dengan absennya penyelidikan serupa oleh aparat keamanan dan anti-

teroris serta media Indonesia, upaya ABC untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses radikalisme pengikut ISIS/IS dilakukan, akhirnya dituding sebagai upaya propaganda Australia.

Hasil investigasi BNPT mengungkap bahwa terdapat paling sedikit 19 pondok pesantren di Indonesia yang terindikasi mengajarkan radikalisme. Pondok-pondok pesantren itu tersebar di Jakarta, Serang, Cirebon, Ciamis, Cilacap, Solo, Lamongan, Aceh, Makassar, Poso, dan Lombok Utara. Jika melihat terdapat hampir 28 ribu pondok pesantren di Indonesia, yang tersebar di 33 provinsi, dengan sekitar 4 juta santri, maka angka 19 pondok pesantren itu menjadi tidak berarti. Namun, diingatkan, jika telah mengkristal, mengeras atau solid, dan menjelma menjadi aktifitas terorisme, angka yang relatif kecil itu bukan lagi harus dipahami semata secara statistik. Ia akan rawan berkembang sebagai sumber inspirasi yang mudah menyebar, rentan, dan berbahaya menyebarkan paham kekerasan agama ke seantero negeri. Ditambah dengan meningkatnya angka kemiskinan dan mendalamnya jurang sosial, serta meluasnya ketidakadilan sosial dan sentimen anti-Barat, radikalisme menjadi penyulut aksi-aksi terorisme baru, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ke mancanegara.

4.2.1.3 Motivasi Warga Negara Indonesia yang Bergabung dengan ISIS

Dalam sub bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai motivasi yang melatarbelakangi warga negara Indonesia untuk bergabung dengan ISIS sebagai milisi teroris asing yang berperan aktif dalam konflik yang ditimbulkan oleh ISIS. Dalam *United Nations paper Combatants on Foreign Soil*, dijelaskan bahwa motivasi yang melatarbelakangi seseorang untuk pergi berjuang atau menjadi tawanan bayaran asing dalam konflik di Somalia yaitu berlandaskan pada ideologi, keagamaan, etnis, rasa tidak aman, berusaha melarikan diri dari tuntutan hukum, dan terakhir adalah karena faktor ekonomi. (UNOSAA,2007) Sejalan dengan itu, Narasumber Bapak Nasir Abbas menjelaskan bahwa faktor utama seseorang bergabung dalam kelompok teroris ialah karena motivasi ideologi dan agama;

“motivasi seseorang terlena dan ikut bergabung dalam suatu kelompok ekstrem adalah karena ideologi dan agama, bukan semata-mata karena brainwash tapi ada suatu dasar dari mereka yang semakin memicu mereka untuk menjadi teroris, faktor utama bukan karena ekonomi karena kebanyakan dari mereka memiliki status sebagai keluarga berada.” (Nasir Abbas,2021)

Senada dengan hal tersebut, Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa seseorang yang sudah terdoktrin paham radikal yaitu karena adanya motivasi agama dan ideologi,

“ya, seseorang dapat terpengaruh hingga menjadi seorang teroris karena adanya motivasi agama dan ideologi”. (Prof. Hikmahanto,2021)

Lebih lanjut, PBB secara khusus menyebutkan mayoritas milisi teroris asing ISIS menyebutkan bahwa agama sebagai faktor pendorong utama mereka. Berdasarkan interpretasi dari Mazhab Hambali mengenai Islam, kelompok Salafi-Jihadis seperti ISIS dapat menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk membela sebagian besar tindakan kekerasan mereka. Terutama, mereka melihat Amerika Serikat serta beberapa sekutunya berikut juga dengan Pemerintahan Suriah Bashar al-Ashad adalah Kafir, hal tersebut juga berlaku di Indonesia, para kaum takfiri yang berafiliasi dengan ISIS menganggap pemerintahan Indonesia sebagai pemerintahan toghut dan wajib untuk diperangi. Mereka memandang bahwa perjuangan melawan musuh islam adalah sebagai membela agama dan dikategorikan sebagai Jihad al-Daf'u (perang defensif), yang didefinisikan sebagai fardhu 'ain dimana diwajibkan berjihad bagi setiap orang yang mampu.(Al-Dawoody, 2013) Namun jelas-jelas hal tersebut dipelintir oleh ISIS karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW secara jelas dan khusus melarang pembunuhan dalam perang kepada lima kategori non-kombatan, yaitu wanita, anak-anak, orang tua, ulama dan al-Asif (tawanan). Berbagai kitab dalam islam kemudian memperluas kategori-kategori orang yang tidak boleh dibunuh dalam perang yaitu seperti orang buta, sakit, gila, petani, pedagang sampai pengrajin.(Al-Dawoody,2013) Hal ini kemudian pada dasarnya menjadikan kombatan atau tentara sebagai satu-satunya target

yang sah dalam skenario perang, seperti yang termaktub dalam Hukum Humaniter dan HAM yang ditetapkan oleh PBB dan diterapkan oleh NATO. Jelas, penyempitan ayat-ayat maupun hadist yang digunakan ISIS hanyalah sebagai pembenaran bagi segala kegiatan brutal ISIS. Dengan mengemas sedemikian rupa dengan Agama, maka dapat menarik kalangan muslim yang cenderung minim literatur dan memiliki kebencian terhadap suatu pihak.

Orang-orang yang bergabung dengan ISIS cenderung mengabaikan penjelasan dan sudut pandang lain mengenai konsep Jihad dalam Islam, mereka dengan sengaja memposisikan diri mereka sebagai laskar atau pejuang yang berada dalam kondisi perang, mereka berasumsi bahwa mereka berupaya mempertahankan kelangsungan hidup kaum muslim dan negara islam. Dengan pemikiran tersebut, peneliti melihat tidak ada Batasan bagi pejuang ISIS, baik asing maupun local untuk menjadi sangat religious dan juga mampu melakukan tindakan kekerasan atas nama ISIS dan dengan sadar berkeyakinan melakukan segala tindakan mereka atas nama Islam. Memang, interpretasi Jihad ini sangat penting dalam doktrin kelompok-kelompok ekstrem seperti ISIS. Al-Qaeda menjadi kelompok teroris pertama yang mengkasifikasikan musuh menjadi dua kategori, yang pertama ialah musuh dekat yaitu pemerintah otokratis yang zalim di tanah muslim. Dan yang kedua adalah musuh jauh yaitu pemerintah non-muslim di luar wilayah yang mendukung musuh dekat. Mereka juga menyatakan bahwa jihad harus dilihat sebagai kewajiban *pre-emptive strike*, artinya mereka tidak harus menunggu serangan terlebih dulu akan tetapi langsung menyerang sebelum diserang.(Joffe,2016)

Menjadi jelas bahwa, milisi teroris asing ISIS sangat menyadari tindakan dari ISIS sebelum bergabung dan menyadari bahwa kemungkinan besar mereka akan terlibat baik secara tidak langsung maupun langsung dalam kekejaman yang dilakukan oleh ISIS, dengan bergabung dengan ISIS mereka masih merasa bahwa ISIS memperjuangkan agama dan

karena itu motivasi agama yang dibawa oleh calon milisi teroris asing menjadi kuat dan membenarkan apa yang dilakukan oleh ISIS. Bagi banyak orang yang diindoktrinasi ke dalam dogma ISIS, keterlibatan mereka dalam serangkaian kegiatan keji seperti pembunuhan dan penindasan adalah suatu tindakan religius dan mereka beranggapan bahwa umat muslim secara luas akan memandang mereka sebagai orang baik karena memperjuangkan agama.

Begitu halnya dengan warga negara Indonesia yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, berdasarkan penjelasan dari mereka yang kembali dari Suriah menyatakan bahwa motivasi utama mereka berangkat ke Suriah adalah karena motif agama, lebih jelasnya ialah mereka bertujuan untuk berjihad dengan berjuang bersama ISIS dan berhijrah dengan pindah ke negara Islam buatan ISIS. Kedua tujuan tersebut dapat peneliti simpulkan sebagai motif agama. Propaganda dengan kemasan agama yang dilancarkan oleh ISIS ternyata terbukti membuahkan hasil, menurut penuturan dari returnis ISIS asal Indonesia bernama Farhan, Dina, dan Dira yang peneliti dapatkan dari buku Dr. Didik Novi Rahmanto berjudul *Returnees Indonesia : Membongkar Janji Manis*, dijelaskan bahwa, mereka mendapatkan informasi mengenai ISIS dari internet, dengan platform media sosial umum seperti blog, WhatsApp, Facebook). Mereka begitu menikmati video-video yang di upload oleh ISIS yang menampilkan suasana hidup di “negara Islam” yang disebutnya sama persis seperti di zaman Rasul. Bahkan khusus untuk Suriah, mereka mengaku telah menemukan di banyak ayat Al-Qur’an dan juga Hadist bahwa kondisi tenteram di Suriah sudah pernah terjadi pada masa kenabian dahulu. Jadi mereka dengan yakin bahwa Suriah adalah negeri yang diberkahi oleh Allah SWT. Mereka juga dengan antusias membaca beragam artikel dan salahsatu tema artikel yang bertema agama, ISIS mengetahui dengan jelas bahwa anak muda lebih menyukai artikel atau bacaan dengan gaya Bahasa sederhana dan juga pendek. Dina contohnya, dia sangat menyukai konten-konten dari platform Tumblr dengan akun

bernama *Diary of Muhajirah* yang berisi penggalan informasi tentang keadaan di Suriah.

“Yaudah, dia (Diary of Muhajirah) lama-lama di FB di banned, dia buka di Tumblr. Akhirnya saya ngikutin dia di Tumblr. Di Tumblr, ternyata makin banyak orang yang make di sana: Paladin of Jihad, al-Muhajirat, disitu saya ngikutin artikel-artikelnya. (...) saya baca tuh, mereka nyampein dalil, oh gini toh ya ternyata agama Islam. Yang tadinya nggak tau jadi tau. Terus dibilang, ada kekhilafahan, (kita disuruh) berhijrah, kaum Muslimin wajib gitu kan berhijrah disana... page-nya Diary of Muhajirah” (Dina, dalam Didik,2020)

Dina juga kemudian menuturkan mengenai kesempurnaan hidup di “negara Islam”, ia mempercayai bahwa di Suriah tidak ada orang yang susah, orang-orang yang hijrah ke Suriah dapat memilih untuk menjadi apa saja, bahkan penangguran pun akan tetap digaji oleh ISIS. Tak hanya soal harta, Dina percaya bahwa “hijrah” ke ISIS mampu memudahkan jalannya menuju surga.

“Dunia dapet, fasilitas yang ini, terus anyone can be anything. Mau jadi penangguran pun gak papa di sana, bakal di urusin lah, bakal sejahtera. Terus yah gimana sih yah hijrah kan pahalanya besar, terus ntar kita meninggal bakal mendapatkan surga” (Dina, dalam Didik,2020)

Sudah jelas bahwa ISIS memelintir ayat-ayat Qur’an dan Hadist, semua demi memenuhi ambisi ISIS mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut dan menguasai dunia. Melalui pemelintiran ini, ISIS berhasil masuk dan meyakinkan banyak orang bahwa kelompok mereka adalah pejuang Islam dan karenanya wajib bagi setiap umat islam untuk berbai’at pada mereka. Dina juga kemudian menuturkan bahwa dia percaya bahwa ISIS memperjuangkan Islam. Buktinya, apa yang mereka lakukan sudah diprediksi dalam Al-Qur’an.

“Terus dalil yang mereka pake waktu itu kan surat An-Nisa ayat 97-100. Wajib berhijrah. Terus nikmat sama rezeki dari Allah bagi orang yang berhijrah. Bahkan belum sampe sana pun, udah dapet surga-Nya. Terus dalil hadisnya bumi Syam diberkahi. Ya udahlah, dalilnya pas, kehidupan disana bener

keliatannya dari buktinya. Terus saya meyakini, dunia akhirat bakal dapet.” (Dina, dalam Didik,2020)

Sementara Dira dan keluarganya berangkat ke Suriah karena percaya bahwa Suriah. Sebagaimana mereka temui dalam pembacaan hadis adalah negeri yang diberkati. Di negeri itu, kekhalifahan akan bangkit dan kejayaan umat islam akan kembali seperti di zaman Rasul dulu.

“Kalau keluarga kami sih yang paling utama, kami baca di hadis-hadis kan jelas tuh bahwa disana itu adalah negeri yang diberkahi. Yang di akhir zaman itu akan tumbuh lagi, akan bangkit lagi kekhalifahan persis seperti masa Rasul.” (Dira, dalam Didik,2020)

Sampai disini saja sudah jelas bahwa motivasi terkuat mereka berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS adalah karena motif agama. Meskipun kemudian diikuti oleh motif lain seperti motif ekonomi, sosial hingga politik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Efraim Benmelech dan Esteban F.Klor ditemukan fakta bahwa ribuan milisi teroris asing dari seluruh dunia berangkat ke Suriah dan Irak memiliki motivasi agama yang diikuti dengan motif ekonomi, sosial hingga politik. (Benmelech dan Klor, 2016) Akan tetapi perlu peneliti tekankan kembali bahwa faktor ekonomi bukanlah faktor utama seseorang bergabung dengan kelompok teroris seperti ISIS, mereka kebanyakan cukup berada bahkan tergolong kaya raya. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Edwin Bakker dalam *short course* yang peneliti ikuti, beliau menjelaskan bahwa kemiskinan dan terorisme tidaklah memiliki hubungan yang kuat.

“While studying the characteristics of individual terrorists, it seems strange to assume a direct link between poverty and terrorism. Most terrorists are not very poor, or much poorer than others. In fact, some terrorists are extremely rich. For example is the so-called Christmas Day Bomber. Umar Farouk Abdulmutallab, who in 2009 tried to blow up a plane heading for Detroit. Well, he studied in London and was of a well-to-do family from Nigeria. And there are many other examples of terrorists from upper or upper middle class. Take, for instance, Anders Breivik, who killed almost 80 people in Norway. Or to take an example from the 1960s and 70s, from left-wing terrorism, Ulrike

Meinhof, one of the key persons of the Rote Armee Fraktion. She also came from a well-to-do family, was highly educated, and had lots of opportunities in life. Studying the characteristics of jihadi terrorists in Europe, I found out that they were mainly children of migrants or migrants themselves. And they were of lower parts of society.” (Prof. Edwin Bakker,2020)

Begitu juga dijelaskan oleh Bapak Nasir Abbas bahwa motif ekonomi bukanlah penyebab utama mereka bergabung dengan ISIS, karena banyak dari mereka yang berangkat ke Suriah, Irak maupun Afghanistan merupakan orang kaya atau berasal dari keluarga mapan. Contohnya saja Umar yang merupakan seorang manajer di perusahaan, Umar terpengaruh karena adiknya yang kerap mengadakan pengajian keagamaan di kantornya. Adiknya juga merupakan seorang pengusaha yang terbilang sukses namun pada akhirnya dia meninggalkan bisnisnya tersebut karena focus pada pengajian yang diikutinya, dan hal ini berpengaruh kepada Umar serta keluarganya yang pada akhirnya Umar sekeluarga berangkat ke Suriah dan meninggalkan perusahaan yang dipimpinnya.

“Makanya saya juga diajak ikut. Ikut di pengajian itu, terus berlanjut sampai dengan akhirnya perusahaan tidak terurus. Jadi udah bukan ngurusin bisnis, tapi fokus kepada pengajian.. memang kalua adik saya mengadakan pengajian di rumah ibu saya dan saat itu saya sedang ada di rumah, saya ikut mendengarkan sampai akhirnya kita berangkat ke Suriah. Saya juga ajak anak saya yang laki-laki. Jadi Farid ajak saya, Farid ajak anaknya Ryan. Terus anaknya Ryan ajak bapaknya. Jadi berantai gitu.” (Umar dalam Didik,2020)

Maka dari itu, berdasarkan motivasi utama warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan pandangan mereka, propaganda-propaganda yang dilancarkan oleh ISIS merupakan suatu kebenaran dalam agama. Mereka bergabung dengan ISIS karena dilandaskan pada keimanan sebab keimanan merujuk pada hal-hal yang dijanjikan, tetapi harus digapai dengan perjuangan, kepercayaan diri, dan persaksian atas keimanan yang baik. Kedua sumber agama ini berhubungan erat, hilang salahsatu maka timpanglah pemahaman seseorang akan agamanya. Itu sebabnya, agama tak hanya

berisi sesuatu untuk dijaga dan dipertahankan secara sungguh-sungguh, tetapi juga untuk dibagikan kepada lebih banyak orang. Dalam konteks ini, dekonstruksi mengubah pesan agama sebelum sampai kepada para MTA. Agama yang turun untuk menjadi pendamai justru digunakan sebagai alasan untuk bertikai. Persepsi mengenai kehidupan sejahtera yang ditumpuk dengan distorsi ajaran-ajaran agama adalah bara untuk kobaran api yang akan terjadi berikutnya. Oleh karena itu, menyebut terorisme sebagai kesalahpahaman dalam beragama adalah tidak tepat. Terorisme lebih cocok dikatakan sebagai *misused* atau penyalahgunaan terhadap agama.

4.2.1.4 Tipe Returnis ISIS

Seperti yang dikutip dari RAND Corporation yang menjelaskan bahwa returnis ISIS memiliki tipe dan karakteristik tersendiri, mereka memiliki tingkat bahaya yang jauh lebih tinggi daripada teroris local yang tidak pernah ke luar negeri maupun melakukan aksi teror di negara lain. Secara lebih rinci, RAND Corporation kemudian mendeskripsikan beberapa tipe dan potensi bahaya dari returnis ISIS, tipe tersebut berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Pertama, returnis laki-laki. Mereka adalah kelompok yang paling berbahaya lantaran memiliki kemampuan dan pengalaman berperang yang sangat baik. Pengalaman tinggal dan dilatih langsung oleh ISIS selama berada Suriah dan Irak telah menjadikan kelompok ini begitu berbahaya. Returnis laki-laki juga disebut memiliki mental yang lebih terlatih, utamanya dalam hal eksekusi serangan dan juga taktik bertempur. Mereka telah terbiasa melihat dan bahkan ikut menumpahkan darah selama ikut bertempur bersama ISIS. Bahaya lainnya, kelompok ini memiliki jaringan komunikasi yang kuat dengan kelompok teroris local, sehingga ketika kembali mereka akan mudah menyebarkan pengaruh ke kelompok-kelompok teroris lokal bahkan masyarakat biasa yang mengidolakannya karena telah sampai ke “negara Islam” dan memperjuangkan agama.

Kedua, returnis perempuan. Meski tidak memiliki level yang berbahaya yang sama dengan laki-laki, kelompok ini tetap tidak bisa dianggap remeh. Returnis perempuan adalah masa depan kelompok teroris. Mereka melaksanakan fungsi fatal yaitu melahirkan bayi-bayi yang akan mereka didik untuk menjadi teroris baru di masa mendatang. Mereka menyalahgunakan posisinya sebagai *madrasatul ula* (مدرسة العُلا) atau sekolah pertama bagi anak-anaknya untuk kemudian mereka meracuni otak anak-anak mereka dengan doktrin-doktrin terorisme ala ISIS.

Para perempuan ini juga kerap berfungsi sebagai mata dan mulut untuk kelompok terornya, utamanya dalam menyebarkan doktrin dan rekrutmen. Sejumlah laporan menyebut para perempuan ISIS diberi tugas vital, khususnya di bidang media. Mereka aktif menggunakan media sebagai corong untuk menyebarkan doktrin biadab ala ISIS. Mereka ada dan meracuni siapa saja melalui pelbagai platform media sosial, mulai dari chat personal hingga grup-grup WhatsApp, maka tidak aneh apabila di grup-grup WhatsApp kerap ada yang membagikan berita bohong hingga narasi-narasi provokatif yang berujung pada tersulutnya emosi anggota kelompok dan membenarkan tindakan dari kelompok teroris serta kaum takfiri yang anti terhadap perbedaan.

Ketiga, returnis anak-anak. Mereka dapat peneliti kategorikan sebagai tipe returnis yang tidak kalah bahayanya dari kedua tipe diatas. Mereka digolongkan berbahaya karena mereka memiliki pengalaman traumatis yang cukup parah. Pengalaman ini akan semakin memudahkan mereka untuk di doktrin di kemudian hari. Setidaknya, anak-anak yang pulang dari daerah konflik sudah memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Mereka tidak lagi menggunakan masa kecilnya yang seharusnya dihabiskan untuk bermain layaknya anak-anak seumurannya. Masa kecil mereka telah hilang jauh sebelum waktunya.

Data dan fakta dari *RAND Corporation* bahkan mengungkakan bahwa anak-anak returnis telah dilatih bertempur, mereka sudah mulai diajari untuk

mengenal jenis-jenis senjata dan bom serta tata cara menggunakannya. Beberapa juga sudah didoktrin tentang kemuliaan melakukan Tindakan membunuh orang lain dan melakukan bom bunuh diri. Bagi anak-anak, memegang dan menggunakan senjata secara langsung tentu lebih seru apabila dibandingkan dengan melakukannya di *video game* karena memang mereka tidak punya waktu dan sarana dalam bermain *video game*. Dan inilah celah yang dimanfaatkan oleh ISIS dalam mendoktrin anak-anak.

Di Indonesia sendiri, doktrin kekerasan terhadap anak-anak mulai terlihat dari demo yang dilakukan sejumlah ormas yang mengatasnamakan Islam terhadap Basuki Tjahaya Purnama atas dugaan penistaan agama. Anak-anak terbukti dan terekam jelas menyerukan "*Bunuh si Ahok!*" tidak hanya disitu, pada saat pawai obor di Jakarta pada Mei 2017, (BBC, 2017) anak-anak dengan lantangnya memekikkan "*Bunuh, Bunuh, Bunuh!*".

Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan dan dapat memicu timbulnya pelaku teror di kemudian hari. Apabila anak-anak di Indonesia terus di doktrin seperti itu, maka bukan suatu hal yang sulit bagi ISIS melalui returnis ISIS yang kembali ke Indonesia dapat menanamkan doktrin-doktrin Salafi-Jihadis ekstrem ala ISIS. Apabila telah terjadi seperti itu, tentunya akan lebih sulit bagi pemerintah Indonesia menghadapi lonjakan anggota kelompok teroris di dalam negeri, dan akhirnya stabilitas keamanan nasional tentu akan terancam, potensi konflik di tengah masyarakat tidak akan terelakkan.

4.2.2 Peran dan Tantangan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Returnis ISIS

Bukan suatu hal yang mudah menangani permasalahan kedatangan para returnis ISIS, untuk menghadapi permasalahan terorisme dalam negeri saja merupakan suatu perkara yang cukup kompleks. Di satu sisi, negara wajib melakukan upaya efektif dalam menjawab problematika

kepastian kepulungan simpatisan ISIS asal Indonesia, negara juga dituntut melakukan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman dan menciptakan kondisi di mana rakyat menikmati keadilan, kemakmuran, dan keamanan kolektif dari segala bentuk ancaman termasuk returnis ISIS yang telah berada di tanah air, baik yang ada di tahanan, tempat deradikalisasi, maupun yang telah berada di tengah masyarakat. Peran pemerintah dalam menghadapi returnis ISIS saat ini masih perlu ditingkatkan, kebijakan dan langkah antisipatif harus bersifat proaktif yang dilandaskan dengan kepada kejelasan hukum, kolaboratif antar institusi pemerintahan, penjagaan yang ketat di setiap perbatasan negara karena Indonesia memiliki banyak sekali pulau dan merupakan perkara yang sulit untuk membentengi setiap perbatasan yang sangat luas dimiliki Indonesia, dan apabila mereka sudah berada di tanah air maka mau tidak mau program deradikalisasi harus lebih di optimalkan. Lalu juga perlu diketahui, dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam, pemerintah harus memaksimalkan peran aktif dari masyarakat umum sebagai mana termaktub dalam strategi pertahanan Indonesia yang bersifat semesta. Masyarakat juga berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang mengancam keamanan nasional seperti tindak pidana terorisme yang bersifat global.

Akhir-akhir ini Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang berdampak pada segala aspek kehidupan bangsa, berbagai potensi konflik tentu bermunculan dan hal ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan ujian yang berat terhadap pemerintah dalam mengelola negara. Dengan kondisi seperti saat ini, tentunya akan menjadikan kelompok teroris ISIS untuk kembali muncul ke permukaan dan menyebarkan propaganda-propaganda keji, bertambah subur berkembangnya paham ekstremisme ala ISIS yang bersifat *transnational organized crime* (kejahatan transnasional yang terorganisir) harus tetap menjadi perhatian yang serius dan tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah Indonesia dan juga masyarakat umum, bangsa Indonesia wajib

meningkatkan kewaspadaan dan bekerjasama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran pemerintah Indonesia dalam mencegah dan mengatasi returnis ISIS harus ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam keamanan nasional seperti kewajiban untuk melindungi kedaulatan negara, mencegah disintegrasi bangsa, hak asasi manusia beserta kejelasan hukum. Peran dari pemerintah tersebut dilakukan untuk menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga keutuhan negara di tengah kondisi bangsa yang sedang dilanda krisis akibat pandemi global.

4.2.2.1 Status Hukum bagi Mereka yang Bergabung ISIS

Dalam melihat fenomena kepulangan simpatisan ISIS asal Indonesia ke tanah air, peneliti setuju dengan upaya pemerintah dan pelbagai kalangan untuk menolak kepulangan mereka, peneliti juga sepakat jika terorisme harus diberantas dan dihadapi menggunakan prinsip *extraordinary* akan tetapi juga harus rasional dan tetap diiringi kebijakan yang tepat juga. Kebijakan pemerintah tersebut contohnya ialah kejelasan hukum berupa status kewarganegaraan dari warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS, hal ini agar dikemudian hari pemerintah Indonesia tidak digugat oleh para simpatisan ISIS asal Indonesia maupun organisasi internasional bahkan mahkamah internasional.

Sebagaimana penjelasan bab sebelumnya, negara dan warganya adalah dua unsur yang saling terikat satu sama lain. Pada prinsipnya, warga negara adalah anggota dari suatu negara, dan oleh karena itu terikat pula segala hak dan kewajiban baginya. Terkait dengan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yang pada intinya, di samping mendapatkan kedudukan yang sama, warga negara wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia”.

Tidak patuhnya warga negara terhadap hukum yang berlaku tentunya membawa konsekuensi hukum bagi dirinya. Wacana pencabutan kewarganegaraan terhadap seseorang yang terlibat dalam organisasi teroris internasional sempat menjadi pembahasan hangat. Kepala BNPT Ansyad Mbai menyatakan dukungan sekelompok warga Indonesia kepada ISIS masuk dalam kategori pelanggaran hukum. Menurut Ansyad, para pendukung ISIS bisa kehilangan status kewarganegaraannya (Tempo, 2018). Jika merujuk pada Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Sebagaimana isi dalam pasal tersebut, tidak ditemukan salah satu syarat seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan dalam konteks keterlibatannya dengan organisasi teroris internasional. Dengan kata lain, tidak ada frasa dalam ketentuan di atas yang dapat mendukung adanya pencabutan status kewarganegaraan WNI. Permasalahan yang harus diperhatikan adalah terkait status dari ISIS sebagai “tentara asing” atau “negara asing”. Merujuk pada Konvensi Montevideo tahun 1933, syarat berdirinya sebuah negara adalah: 1) populasi permanen; 2) wilayah yang tetap; 3) pemerintahan dengan kendali yang efektif; dan 4) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Hingga saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang bersedia menjalin hubungan diplomatik resmi dengan ISIS. Sehingga, pilihan untuk mencabut kewarganegaraan sebagai hukuman terhadap WNI eks ISIS dikhawatirkan justru memberikan legitimasi bagi keberadaan ISIS itu sendiri sebagai sebuah entitas politik. Akan tetapi menurut narasumber Prof. Hikmahanto Juwana, mereka bisa

termasuk dalam kategori tentara asing, sehingga landasan hukum tersebut dapat dipakai, akan tetapi memang harus diperjelas kembali dengan usulan pemerintah bisa membuat suatu kebijakan yang baru.

Wacana pencabutan status kewarganegaraan WNI awalnya terinspirasi dari bentuk penanggulangan terorisme yang dilakukan negara lain, seperti Australia, dan Belanda, yang telah lebih dulu melakukan pencabutan kewarganegaraan terhadap warganya yang terbukti menjadi militan ISIS di timur tengah. Menteri Kehakiman dan Keselamatan Belanda, Stef Blok, mengatakan,

“Dengan pencabutan kewarganegaraan ini mereka tidak mungkin bepergian ke Belanda atau negara Schengen lainnya”.(Kompas,2019)

Sedangkan di Australia, 5 orang yang terbukti bergabung dalam organisasi teroris internasional telah dicabut kewarganegaraannya. Menteri Dalam Negeri Australia Dutton, mengatakan: “Kami telah mengambil keputusan bahwa orang-orang ini terlibat kegiatan serius yang berkaitan dengan teroris”.

Memiliki kewarganegaraan adalah sesuatu yang sangat berharga yang juga termasuk hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, pencabutan status kewarganegaraan seorang WNI yang terlibat organisasi teroris internasional harus terlebih dahulu melalui proses peradilan yang mana proses tersebut selain sebagai bentuk penghormatan atas hak konstitusional seseorang, proses peradilan juga bermanfaat dalam membuktikan sejauh mana keterlibatan WNI dalam kaitannya dengan organisasi teroris internasional yang mana dapat diketahui sanksi yang ideal bagi mereka. Dengan demikian, pencabutan kewarganegaraan dengan cara yang kurang hormat (*less dignify*), yaitu dengan hanya prosedur administrasi, menjadi tindakan yang mungkin mengurangi kehormatan konsep kewarganegaraan sebagai hak konstitusional.

Pencabutan kewarganegaraan dapat berimplikasi pada keadaan seseorang dimana ia tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*). Apabila merujuk pada instrumen hukum nasional, tindakan pencekalan dan pencabutan kewarganegaraan merupakan tindakan yang problematis karena bertentangan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia, secara singkat, Indonesia tidak mengenal akan *stateless*. dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 juga telah menjamin hak seseorang atas status kewarganegaraan sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang mana Indonesia juga merupakan negara pihak, juga telah disebutkan bahwa “setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan.” Selain itu, Pasal 24 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga mengatur bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan”. Sehingga pencabutan kewarganegaraan dengan dasar hukum yang ada bukanlah suatu keputusan yang bijak, pemerintah jelas harus mengkaji dan merumuskan lebih lanjut mengenai kejelasan status hukum simpatisan ISIS ini dan juga merumuskan formula yang tepat apabila pemerintah ingin mencabut kewarganegaraan dari WNI yang bergabung dengan ISIS.

4.2.2.2 Kolaborasi antar Lembaga

Begitu kompleksnya tantangan yang harus dihadapi kedepan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi returnis ISIS asal Indonesia, kolaborasi yang erat antar Lembaga menjadi suatu hal yang menjadi suatu keharusan dan mutlak harus dilaksanakan sebagai syarat upaya pemerintah dalam melindungi rakyatnya dari segala bentuk ancaman dengan tetap berpegang pada HAM dan juga landasan hukum yang jelas terkait penanganan returnis ISIS agar membuahkan hasil yang baik dan efektif. Maka dari itu, peneliti berpandangan bahwa model Kerjasama terintegrasi yang bersifat semesta dari berbagai Lembaga terkait akan menjadi suatu terobosan yang efektif dalam menangani pelbagai ancaman

negara termasuk ancaman terorisme. Penggunaan model kerja sama yang bersifat kolaboratif dan terintegrasi (*Integrated total cooperation model*) di antara Lembaga-lembaga terkait dapat menjadi katalis dalam mencapai efektivitas penanganan returnis ISIS dan juga meminimalisir potensi konflik yang akan terjadi.

Adapun bersifat semesta disini ialah berdasarkan sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta atau melibatkan pelbagai pihak termasuk masyarakat umum, tidak hanya terbatas pada beberapa Lembaga pemerintahan semata sebagaimana yang telah terakomodir dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 yang memuat penjelasan teknis tentang mekanisme kerja sama kolaboratif di antara Kemenkopolhukam, BNPT, BIN, TNI, dan Polri, yang sebenarnya dapat berjalan di bawah kerangka legalitas yang bersifat mengikat. Namun, kenyataannya saat ini kolaborasi tersebut belum sepenuhnya efektif, sebagaimana penjelasan narasumber mba Odarina yang merupakan Analis Muda Keimigrasian yang berkedudukan di Direktorat Pengawasan Keimigrasian, Dirjen Keimigrasin, Kementerian Hukum dan HAM RI. Beliau menjelaskan bahwa saat ini kolaborasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan karena beberapa kendala termasuk diantaranya adalah permasalahan ego sektoral.

“Mungkin masukannya ialah pada kolaborasi antar Lembaga, karena saat ini kendala yang kami alami dalam melaksanakan sinergitas antar Lembaga itu ada pada masih adanya beberapa kendala ya, salahsatunya ialah masih adanya ego sektoral antar Lembaga, sehingga kedepannya kami mengharapkan kolaborasi antar Lembaga menjadi lebih baik lagi.”
(Odarina,2021)

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran yang terkait dengan penanganan returnis ISIS dari dari beberapa Lembaga terkait, selama ini masih diwarnai adanya tumpang tindih, karena adanya tugas dan wewenang masing lembaga yang tidak diatur secara jelas di dalam undang-undang. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk dapat mempertegas peran dan proyeksi pelibatan masing lembaga secara proporsional dan

objektif dalam sebuah kerangka kerja bersama melalui penerbitan aturan tambahan yang bersifat teknis sehingga pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran Lembaga-lembaga terkait dalam menangani aksi terorisme di Indonesia dapat berjalan secara kolaboratif. Kerja sama dalam penanganan suatu ancaman returnis ISIS harus dapat secara optimal, yang berarti dalam kondisi kontinjensi teror setiap unsur sudah memahami dan melakukan peran serta tugasnya masing-masing tanpa melampaui kewenangan yang dimiliki. Sebagaimana ditegaskan dalam teori *Collaborative Governace*, bahwa tuntutan penyelesaian masalah secara kolaboratif didasari oleh kesadaran untuk dilakukannya sebuah kerja sama dan koordinasi, karena keterbatasan yang dimiliki oleh salah satu atau beberapa badan dalam menjaga kepentingan publik yang dalam hal ini adalah rasa aman. (Junaidi,2015)

Maka dari itu, untuk memaksimalkan kolaborasi antar Lembaga dalam upaya menghadapi returnis ISIS ini peneliti mengajukan model Kerjasama terintegrasi yang bersifat semeta (*Integrated total cooperation model*) yang peneliti kaji dengan berdasarkan pada teori *collaborative government* dari Ansell dan Gash. (Ansell dan Gash,2007). Penjelasan mengenai model ini akan peneliti jelaskan secara rinci pada sub bab pembahasan.

4.2.2.3 Penjagaan di Perbatasan Negara

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kelompok teroris ISIS berupaya meluaskan pengaruhnya di seluruh dunia dan terbukti bahwa ISIS memiliki pengikut dari seluruh dunia khususnya di Kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh, Filipina pernah mengalami konfrontasi dengan para pendukung ISIS di kota Marawi, sejak 23 Mei sampai Juli 2017. Diketahui bahwa para pendukung ISIS tersebut berasal dari beberapa negara terutama Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Sehingga, perbatasan negara menjadi perhatian penting dalam penelitian ini.

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara yang memiliki peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan kekayaan alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Terdapat dua hal penting yang harus dilakukan yaitu pembangunan daerah perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*) yang bertujuan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat setempat dan pendekatan keamanan (*security approach*) yang berguna agar terciptanya stabilitas politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya. Penerapan-pendekatan ini dilakukan secara berintegrasi dan berkelanjutan. Kedaulatan negara apabila ditinjau dari terminologi konseptual internasional adalah adanya pengakuan suatu negara lain terhadap wilayah perbatasan negara. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.

Secara geografis negara Indonesia berbatasan darat secara langsung dengan negara lain. Tercatat ada tiga negara yang berbatasan darat secara langsung dengan Indonesia yaitu negara Timor Leste, Malaysia dan Papua Nugini. Negara Timor Leste berbatasan darat langsung dengan provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Papua Nugini berbatasan langsung dengan provinsi Irian Jaya sedangkan Malaysia berbatasan langsung dengan Kalimantan. Lebih lanjut, Konvensi PBB yang disepakati pada tahun 2000 mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime – UNTOC*). UNTOC yang sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 yang menyebutkan sejumlah kejahatan yang mencakup kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia,

penyelundupan migran serta produksi senjata api, bahkan konvensi ini juga mengakui bahwa kejahatan terorisme adalah salah satu kejahatan lintas negara yang terorganisir. Dari beberapa konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan-batasan negara sebagai akses pintu keluar masuk orang maupun barang dan juga wilayah perbatasan ini memiliki kerawanan dari giat militernya. Dengan adanya perbatasan di suatu negara menciptakan kejahatan lintas negara yang dapat menimbulkan kejahatan terorisme yang terorganisir

Pada Tahun 2018 Badan Intelijen Negara (BIN) merilis keterangan bahwa daerah NTT sudah tercatat sebagai tempat yang dijadikan tumbuh kembang embrio terorisme sejak beberapa tahun terakhir. Embrio terorisme muncul sejak Polisi menangkap Syamsudin Uba dan Zakaria Kiri. Lalu, menurut data yang peneliti peroleh dari Direktorat Kontra Terorisme, Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan bahwa di sejumlah perbatasan wilayah NKRI rentan menjadi pintu masuk dan keluar dari returnis ISIS.

“Rawan perlintasan orang dan barang terutama di wilayah Sulawesi Utara (Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Bitung) dan Kalimantan Utara (Nunukan) yang berhadapan langsung dengan wilayah Tawau dan Sabah Malaysia yang menjadi jalur perlintasan menuju Filipina Selatan, serta wilayah perbatasan Kepulauan Riau menuju Malaysia dan Singapura.... Negara-negara perbatasan dan Jiran juga sering digunakan sebagai jalur transit menuju Syam/Suriah” (BIN, Dir Kontra Terorisme, 2020)



Gambar 4.2

Peta Persebaran Lalulintas Teroris / Returnis ISIS

(Sumber : BIN,Dir Kontra Terorisme,2019)

Informasi intelejen menghendus pergerakan kelompok militan terorisme telah melakukan konsolidasi dan menghimpun kekuatan penuh untuk “berjihad” baik di tanah air maupun ke negara lain. Berdasarkan hasil dari intelejen bahwa ada beberapa tersangka terorisme yang bermukim di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang mana identitas masih dirahasiakan oleh aparat dalam tujuan keamanan, kedua tersangka ini pasangan suami istri yang lari dari negara tetangga yaitu Malaysia, dan sampai sekarang tersangka tetap dalam pantauan aparat setempat, sehingga wilayah perbatasan Indonesia sangat produktif sekali bagi pintu masuk dan keluar dari simpatisan ISIS asal Indonesia, meskipun pemerintah Indonesia melarang mereka untuk pulang ke tanah air, mereka dapat dengan mudah keluar masuk negara ini karena memang masih terdapat sejumlah celah di perbatasan. Kekacauan di dalam negeri bentuk dan motifnya seperti aksi teror dan kekerasan yang pernah kita alami sejak dua puluh tahun terakhir ini. Berdasarkan penelusuran intelijen, aksi kelompok terorisme sudah pada tahap penyelundupan senjata api dan bahan peledak. Mereka memanfaatkan lemahnya negara kita dalam tindak pengawasan wilayah perbatasan. Berdasarkan data dan fakta yang peneliti dapatkan dari personel Satgas Pamtas RI-MLY dijelaskan bahwa saat ini personel Satgas Pamtas masih memiliki keterbatasan kemampuan dan pengetahuan bidang intelijen teritorial, sehingga berbagai pelanggaran perbatasan masih saja ditemui.

“Pemantauan yang tidak sesuai dengan pola operasi yang ditentukan dalam strategi pada Perintah Operasi. Selain itu, pola kegiatan tersebut juga tidak didukung informasi intelijen yang aktual. Hal tersebut berakibat pada kekosongan pengawasan di sepanjang perbatasan darat. Sementara itu, kondisi lingkungan fisik yang ada dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang telah digariskan dalam strategi pada Perintah Operasi, tetapi akibat pola kegiatan yang berbeda dari pola operasi dalam strategi yang ditentukan tersebut, keuntungan taktis yang diperoleh dari kondisi lingkungan fisik tidak dapat dimanfaatkan. Dengan keterbatasan Satgas pamtas dalam wawasan yang berkaitan dengan membentuk intelijen teritorial akan berdampak pada kemungkinan masih terjadinya

penyelundupan barang, senjata api dan munisi, narkoba, serta penyusupan milisi teroris asing.” (Personel Satgas Pamtas RI-MLY,2020)

Selain dariapada itu, keterbatasan jumlah pos penjagaan Satgas Pamtas juga kurang. Begitu luasnya perbatasan Indonesia, tentunya masih kurang efektif apabila jumlah Pos yang tergelar tergolong sedikit, contohnya saja dari perbatasan RI-MLY saja, Satgas Pamtas hanya memiliki 58 pos. Hal inilah yang mengakibatkan kurangnya pengawasan Satgas terhadap kemungkinan adanya kegiatan illegal termasuk keluar masuknya returnis ISIS yang terjadi di sepanjang wilayah perbatasan tersebut, apalagi dari jarak tersebut, masih terdapat sekitar 350 Km lagi daerah yang belum tersentuh sama sekali oleh Satgas (*blank spot area*) tepatnya di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK).

“Ada beberapa Pos yang penempatannya tidak sesuai dengan tugas pokok, sehingga pencapaian tugas pokok menjadi tidak optimal. Diantaranya yaitu Pos Klawik. Jarak menuju patok batas $\pm 13,5$ Km dengan waktu tempuh ± 9 jam untuk mencapai patok terdekat. Serta, Pos Riam sejawa, jarak menuju patok batas $\pm 3,5$ Km dengan waktu tempuh ± 4 jam untuk mencapai patok terdekat.” (Personel Satgas Pamtas RI-MLY,2020)

Begitu juga dengan di perbatasan RI-RDTL, personel dari Satgas Pamtas YONIF R-321/GT memiliki kendala dalam melakukan penjagaan pembatasan yaitu minimnya kendaraan operasional di tiap Pos penjagaan dan juga personel yang kurang kurang mampu menguasai medan dikarenakan kondisi medan prapenugasan berbeda dengan ketika penugasan. Hal ini disampaikan oleh personel Satgas Pamtas YONIF R-321/GT yaitu Serka Adi Surachman Bintara Satgas Pamtas YONIF R-321/GT dan Pratu Dwi Ambara P selaku Tamtama Satgas Pamtas YONIF R-321/GT.

“Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kendaraan operasional di pos-pos dan cara mengatasinya adalah dengan cara bergantian pemakaian kendaraan operasional”. (Personel Satgas Pamtas RI-RDTL,2020)

“Kendala adalah medan pratugas dan kultur budaya masyarakat tidak sesuai dengan medan dan kultur budaya masyarakat pada medan tugas dan cara mengatasinya adalah berusaha membuat kondisi medan pratugas agar sesuai dengan medan sebenarnya”. (Personel RI-RDTL,2020)

Alhasil, dengan mudahnya terjadi transaksi keluar-masuk orang dan senjata. Inilah yang dikatakan sejumlah personil badan intelejen bahwa bahaya yang sedang mengintai Indonesia tengah ‘menunggu waktu’.

4.2.2.4 Deradikalisasi

Maraknya gerakan dan penyebaran paham radikalisme telah memunculkan upaya untuk menanggulangnya, yang salah satunya adalah Deradikalisasi. Sebelumnya, sesuai dengan prosedur deradikalisasi yang dilakukan lembaga pemerintahan terkait, ada 4 tahapan deradikalisasi yang dijalankan oleh Indonesia sesuai dengan PP 77/2019, yaitu melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial serta dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan dan kewirausahaan. *Pertama*, identifikasi dan penilaian terdiri atas identifikasi dan penilaian awal serta identifikasi dan penilaian lanjutan. Identifikasi dan penilaian awal dilakukan kepada tersangka. Sedangkan identifikasi dan penilaian lanjutan dilakukan kepada terdakwa, terpidana, atau narapidana secara periodik enam bulan sekali atau sesuai kebutuhan. *Kedua*, tahap rehabilitasi dapat berbentuk konseling individu dan pelaksanaan kelas kelompok. Rehabilitasi diberikan dengan materi paling sedikit mengenai psikologi, keagamaan, wawasan kebangsaan, serta hukum dan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, reedukasi dapat berbentuk penguatan pemahaman keagamaan; penyuluhan mengenai wawasan kebangsaan dan isu perdamaian; pengetahuan mengenai penyelesaian konflik; dan/ atau pendidikan karakter. *Keempat*, reintegrasi sosial dilakukan dalam bentuk penguatan rasa percaya diri untuk kembali kepada masyarakat agar tidak takut atau bergantung lagi dengan kelompok atau jaringannya; peningkatan

pemahaman dalam berinteraksi dengan masyarakat; peningkatan kemampuan sosial dalam proses integrasi kembali ke masyarakat; dan/atau meningkatkan keterampilan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya.

Sementara itu, dalam analisis RAND, program deradikalisasi yang dilakukan oleh Indonesia, yang menasar pada perolehan informasi mengenai jejaring teror, dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana kesediaan para mantan pelaku dan anggota jejaring untuk bekerja sama dengan aparat. Namun, apakah di level kognitif mereka mengalami pergantian ideologi tidaklah dapat dijelaskan. Efektivitas proses kerjasama seperti ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Horgan bahwa setelah melewati tahap meninggalkan gerakan radikal, para mantan pelaku teroris pada dasarnya bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka apabila pihak yang bersangkutan menanyakan pertanyaan yang tepat. (Horgan, 2008) Diluar asumsi ini, penelitian ini berpendapat bahwa sejatinya deradikalisasi tidak sepatutnya hanya digunakan sebagai cara utama untuk mendapatkan informasi karena apabila deradikalisasi diletakkan pada posisi tersebut maka proses ini tidak lain merupakan bagian kecil dari kinerja intelijen, yaitu: pengumpulan data, sehingga semakin menjauhkan tujuan awal proses deradikalisasi, yaitu: melunakkan pandangan-pandangan radikal para pelaku tindakan teror. Hal ini juga berpotensi menjadi backlash atau serangan balasan apabila para pelaku tersebut mendapatkan kesan bahwa mereka dimanfaatkan sehingga resikonya adalah rasa kecewa yang dapat semakin memperkuat pandangan radikal dari para pelaku tindakan teror tersebut atau pemanfaatan reward yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada para narapidana berupa hukuman yang lebih singkat justru dimanfaatkan untuk segera kembali kedalam jaringan terorisme.

RAND maupun Horgan juga menyebutkan bahwa dari program deradikalisasi di Indonesia yang didengungkan selama ini hanya ada dua

contoh yang terbilang sukses, yaitu, narasumber Nasir Abas dan Ali Imron alias Ale, terpidana seumur hidup dalam kasus Bom Bali I. Keduanya banyak membantu polisi dalam memberikan informasi terkait jejaring teror. Nasir Abas merupakan warga negara Malaysia yang hingga kini memutuskan tetap tinggal di Indonesia dan, berdasarkan pengakuan kepada peneliti, dia juga menjalankan bisnis kuliner (kebab) untuk menafkahi diri dan keluarganya. Nasir Abas, mantan ketua mantiqi 3 dalam struktur JI lama, dinilai terderadikalisasi mengingat selain bersedia memberikan suplai informasi kepada polisi Indonesia juga aktif menulis buku yang berupaya mendelegitimasi berbagai serangan teror. Nasir pun secara terbuka mempromosikan deradikalisasi kepada para milisi lainnya. Dalam berbagai kesempatan terbuka, Nasir juga turut serta dalam dialog terbuka soal deradikalisasi di media massa maupun non-media. Salah satu bukunya yang fenomenal adalah Membongkar Jemaah Islamiyah.

Selain dua figur mantan teroris yang disebutkan di atas itu, belum ada sosok lain yang dapat dikatakan signifikan terderadikalisasi. Kendati begitu, riset RAND yang menyatakan sulitnya mengukur keberhasilan program deradikalisasi perlu juga untuk disimak. Hal ini bertolak dari sulitnya mengukur apakah seseorang benar-benar sudah terderadikalisasi. Jalan satu-satunya untuk mengukurnya adalah mencermati tindakan dan perkataannya kendati perilaku dan perkataan tidak semata-mata mencerminkan pula tujuan atau cita-cita seseorang (dalam hal ini mantan pelaku teror).(Rabasa,2010) Dalam penelitian Horgan, dari sejumlah individu yang sempat terlibat terorisme yang pernah diwawancarainya selama kurun waktu 2 tahun dan diidentifikasi telah terputus keterikatan (*disengaged*), tidak satupun yang dapat dikatakan terderadikalisasi.(Horgan,2008) Oleh karena itu, Horgan berpendapat bahwa rehabilitasi individu pelaku teror secara rasional dan terukur sebaiknya menyasar pada terjadinya disengagement. Bahkan, Horgan mengungkapkan, dalam salah satu wawancaranya dengan ulama Sunni radikal, istilah deradikalisasi sebenarnya terkesan ofensif dan salah arah

karena tak ada yang salah dengan radikalisasi atau menjadi radikal (mengakar, dari kata latin radix atau akar) dalam memahami sesuatu.

Lebih lanjut, program deradikalisasi yang dilakukan untuk mengubah cara pandang para returnis mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan muncul tidak hanya dari returnis sebagai subjek program itu sendiri, namun dari faktor-faktor eksternal, seperti kurangnya anggaran, fasilitas di Lapas, sampai persepsi masyarakat terhadap program deradikalisasi ini yang cenderung tetap menghadirkan penolakan bagi eks napter setelah kembali ke masyarakat. Di luar masih perlunya perbaikan dalam hal materi deradikalisasi yang diberikan kepada napter, faktor-faktor eksternal ini cukup menghambat efektivitas program deradikalisasi. Pada bagian ini peneliti akan mencoba mempelajari lebih lanjut terkait masalah-masalah, kritik-kritik, sampai hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan program deradikalisasi.

Pada tataran implementasi, deradikalisasi seringkali tumpang tindih bahkan tidak bisa diterjemahkan secara konkrit. Ini terjadi karena pada tataran konseptual, deradikalisasi menjadi banyak dan mudah untuk diperdebatkan. Bagi BNPT, deradikalisasi mengacu pada pengertian AS. Hikam yang memiliki dua makna, yaitu pemutusan atau pelepasan diri (*disengagement*) dan deideologisasi (*deideologization*). Pelepasan diri adalah upaya pengarahan pada perubahan perilaku, seperti contoh keluarnya seseorang dari jaringan teroris dengan mengubah perilaku hidupnya, serta akhirnya meninggalkan aturan kelompoknya. Kemudian, deideologisasi diarahkan untuk menghapus pemahaman ideologis atas doktrin politik Islam dan menjadikan Islam sebagai nilai-nilai luhur yang menyemai perdamaian. Orientasi deradikalisasi adalah mengubah spektrum seseorang menjadi tidak lagi radikal, tetapi moderat. (Zuhri dalam Jerry dan Prakoso, 2019)

Secara umum, program ini banyak dikritik karena tidak efektif dalam merubah mindset napi teroris untuk tidak lagi melakukan tindak pidana

terorisme. Banyak kasus para napiter yang telah bebas, kembali mengulangi perbuatannya dengan bergabung dengan kelompok radikal, atau bahkan menjadi *lone wolf* (pelaku teror individu).

4.3 Pembahasan

Fokus penelitian dalam Tesis ini adalah “Ancaman dan tantangan yang dapat ditimbulkan karena kepulangan Returnis ISIS terhadap keamanan nasional”. Secara lebih spesifik, pembahasan dalam penelitian dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi subfokus penelitian, yaitu ancaman yang dapat ditimbulkan oleh Returnis ISIS terhadap keamanan nasional Indonesia serta peran dan tantangan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Returnis ISIS.

4.3.1 Ancaman yang Dapat Ditimbulkan Oleh Returnis ISIS Terhadap Keamanan Nasional Indonesia

Berdasarkan data dan fakta yang telah peneliti jelaskan dalam sub bab hasil penelitian, dapat diketahui bahwa serangan-serangan militer yang dilakukan oleh negara-negara koalisi berhasil menyudutkan ISIS. Salahsatu yang mengakibatkan dampak yang cukup besar yaitu gempuran militer Amerika Serikat dan koalisinya ke sebuah rumah di Mosul yang diyakini sebagai tempat penyimpanan uang ISIS pada tahun 2016. Serangan itu jelas melumpuhkan logistik dan laju ISIS. Meskipun pasukan koalisi berhasil mengalahkan pasukan ISIS di medan pertempuran. Ini bukan berarti ISIS telah sepenuhnya habis. Kekalahan ISIS, baik di Mosul maupun Baghouz yang menjadi markas mereka hanyalah sebatas hilangnya territorial, bukan hilangnya ideologi (Wademan dalam Didik,2020). ISIS masih terus menjadi ancaman yang serius walaupun secara kekuatan mereka telah tergerus dan tersudutkan, karena mereka sudah terlanjur menancapkan ideologi salafi-jihadis ekstrem kepada pengikutnya. Mengalahkan ideologi tidak bisa dilakukan dengan gencatan senjata, tetapi harus dengan *soft power* dan ini

bukan merupakan tugas yang mudah. Peneliti beranggapan bahwa raga bisa saja di tahan dan dihancurkan tapi tidak dengan pemikiran dan ideologi yang telah mengakar (*radix*).

Terbukti dengan munculnya pernyataan dari juru bicara dan komandan senior pasukan al-Bunyan al-Marsous, Mohamed Ghasri, menyatakan bahwa pasukannya masih melihat pergerakan ISIS di daerah lain. Padahal, ISIS sudah berhasil ditendang keluar dari Mosul dan Baghouz.

“Kami telah melihat pergerakan Daesh (ISIS) di selatan Sirte, tempat mereka mencoba untuk berkumpul kembali dan menembusi jalur pasukan kami di selatan.” (Saju,2017)

Mengenai kemungkinan ISIS memindahkan pusat kekuatan di wilayah Asia, perlu pula diwaspadai oleh Indonesia. Bahkan menurut penuturan BIN, Filipina bagian selatan masih menjadi salahsatu tujuan hijrah bagi pendukung ISIS dari Indonesia.

“Filipina Selatan masih menjadi salah satu tujuan hijrah (migrasi) bagi pendukung ISIS dari Indonesia” (Direktur 33 BIN,2020)

Secara geografis, Indonesia memiliki banyak spot terbuka dan strategis untuk masuknya milisi teroris asing ISIS, terlebih lagi ideologi ISIS juga cukup menyebar di kalangan islam garis keras di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya bahwa kelompok-kelompok islam garis keras di Indonesia secara terang-terangan menyatakan dukungan dan sumpah setianya kepada ISIS. ISIS melalui jaringan Al-Qaeda, menyebarkan paham-paham ekstrem kepada kelompok-kelompok islam garis keras yakni Jamaah Ansharusy Syari'ah (JAS), dan Majelis Mujahidin (MM), mereka berkomitmen mewujudkan Masterplan Al-Qaeda 2020 melalui Jihadul Kalimah dengan membangun aliansi bersama lintas organisasi dan tokoh Islam di Indonesia (PA 212, FPI, FUI, GNPF Ulama). Terakhir JAS bersama PA 212 melahirkan organisasi baru bernama Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUI-I) di

bawah komando Habib Rizieq Shihab. Lebih lanjut, Majelis Mujahidin secara organisasi melakukan gerakan yang sama dengan JAS, memanfaatkan perkembangan politik dan pada saat yang sama tetap melakukan kondolidasi dan *i'dad jihadi*.

Maka dari itu, dengan adanya dukungan dari beberapa kelompok islam garis keras yang ada di Indonesia, ditambah lagi dengan fenomena kekalahan ISIS yang telah kehilangan banyak wilayah kekuasaannya, para milisi teroris asing yang kembali ke negara masing-masing dan menjadi returnis termasuk di Indonesia. Maka, hal ini patut diwaspadai, sebab mereka bukanlah orang yang sama lagi ketika kembali. Para returnis ISIS ini telah sarat dengan pengalaman berada di wilayah konflik dan mahir dalam menggunakan senjata untuk kegiatan amaliyah mereka. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Edwin Bakker menjelaskan bahwa returnis ISIS akan mencoba mempengaruhi masyarakat dan merekrut anggota baru untuk kegiatan teror mereka.

“Groups that support the jihad in Syria and Iraq and other places from their homes by way of financing it or recruiting people. Or being part of the propaganda machine and they are a threat to stability in the region as a whole.... they also might move on to the next fight, continuing this violence in the region. So we have to be very worried about that as well. These foreign fighters are not only a threat to their countries of origin and not only a threat to Syria and Iraq, but to the region as a whole.” (Prof. Edwin Bakker,2020)

Isi kepala mereka pun sudah tidak sama lagi. Terlebih, ISIS sempat memberi maklumat kepada para pengikutnya agar meneruskan agenda teror di manapun mereka berada. Dan untuk melakukan ini, ISIS tidak pernah mewajibkan pengikutnya untuk melakukan serangan berkelompok atau dalam skala besar. Para returnis ISIS dapat melakukan teror secara individu, sesuai dengan kemampuan masing-masing asal terciptanya teror berujung konflik di tengah masyarakat tanpa peduli sekecil apapun itu. Bagi ISIS, serangan teror adalah penanda bahwa ISIS masih ada. Masih segar

ketika penelitian ini dilakukan, bahwa terjadi serangan bom bunuh diri di Irak yang di klaim oleh ISIS merupakan perbuatannya.

Dari fakta tersebut, menjadi bukti nyata bahwa ISIS masih ada dan melalui tangan-tangan returnis ISIS inilah, ISIS mencoba mengais kesempatan untuk bangkit kembali dan melakukan teror, yang bukan tidak mungkin, lebih mengerikan dari yang pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap keberadaan ISIS perlu ditingkatkan.

Lebih lanjut, berdasarkan data dan fakta yang ada dihadapkan pada konsep terorisme menurut Schmid dan Jongman menjadi jelas bahwa Terorisme ialah metode yang memiliki inspirasi dari kepanikan atas suatu tindakan jahat yang dilakukan secara berturut-turut, yang dapat digunakan secara individu, grup, pemilik kekuasaan, ataupun kelompok pemerintahan dengan alasan tertentu, kriminal, atau politik, di mana – berlawanan dengan pembunuhan – sasaran tindak kekerasan yang dituju bukanlah sasaran utama. Begitu juga dengan ISIS, melalui tangan-tangan returnis ISIS yang telah kembali ke negara asalnya masih melakukan Tindakan jahat secara berturut-turut baik itu dilakukan secara individual maupun berkelompok. Lalu, korban kekerasan manusianya biasanya terpilih dengan cara acak (dengan sasaran kesempatan) atau secara selektif (sasaran simbolik atau representatif) dari suatu populasi sasaran, serta dapat bertindak menjadi pembawa pesan. Proses komunikasi berdasarkan ancaman, kepanikan, dan kekejaman antara kelompok teroris, korban penderita, serta sasaran pokok dijadikan alat termanipulasinya target utama atau sebenarnya yang dapat berubah menjadi target serangan, pemaksaan secara tuntutan, atau masuk dalam daftar yang perlu diperhatikan oleh kelompok tersebut, hal ini tergantung apakah yang diutamakan oleh kelompok tersebut berupa intimidasi, paksaan, atau propaganda. Seperti halnya dengan ISIS yang melakukan aksinya sebagai bentuk propaganda.

Masih adanya eksistensi dari ISIS tidak terlepas dari motivasi yang ada pada benak dan pikiran simpatisan ISIS serta masih suksesi dari

proses indoktrinasi yang dilakukan rekruter ISIS kepada simpatisan ISIS. Guna mengkaji fenomena tersebut, peneliti menggunakan teori motivasi dari Maslow yang menjelaskan bahwa tentang teori kebutuhan, tidak bisa lepas dari teori motivasi yang menjadi landasannya. Ada tujuh konsep dasar yang digunakan Maslow dalam memahami manusia secara menyeluruh di antaranya adalah: Pertama, manusia adalah individu yang terintegrasi penuh. Kedua, karakteristik dorongan atau kebutuhan yang muncul tidak bisa dilokasikan pada satu jenis kebutuhan tertentu. Ketiga, kajian tentang motivasi harus menjadi bagian dari studi tentang puncak tujuan manusia. Keempat, teori motivasi tidak dapat mengabaikan tentang kehidupan bawah sadar. Kelima, keinginan yang mutlak dan fundamental manusia adalah tidak jauh dari kehidupan sehari-harinya. Keenam, keinginan yang muncul dan disadari, seringkali merupakan pencetus dari tujuan lain yang tersembunyi. Ketujuh, teori motivasi harus mengasumsikan bahwa motivasi adalah konstan dan tidak pernah berakhir, dan masih ada beberapa konsep dasar lainnya. Dari teori motivasi dari Maslow tersebut jelas terlihat bahwa motivasi adalah konstan dan tidak pernah berakhir, sehingga milisi teroris asing asal Indonesia yang kembali ke tanah air sebagai returnis jelas memiliki tingkat ancaman yang tinggi karena motivasi yang kuat dimiliki oleh mereka untuk bergabung dengan ISIS. Peneliti juga sebelumnya menjelaskan motivasi warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS kebanyakan karena motif agama, sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, motif mereka akan tetap sama dan tidak berubah ditambah lagi Indonesia sebagai *safe heaven* bagi ISIS karena di Indonesia terdapat cukup banyak yang terpengaruh paham salafi-jihadis ekstrem, orang-orang yang terpengaruh ini beranggapan bahwa mereka yang kembali dari Suriah dan Irak adalah pejuang dalam membela agama sehingga mereka di agungkan dan juga terdapat kelompok-kelompok islam garis keras yang mendukung ISIS.

Selanjutnya, dalam menganalisa motivasi yang kuat mengakar dalam benak dan pikiran para returnis ISIS, peneliti akan menggunakan konsepsi

Doktrinasi dimana dalam konsepsi ini dijelaskan bahwa Indoktrinasi dapat dipahami sebagai proses penting dalam segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tergabung dalam organisasi teroris, dengan memberikan ajaran, motivasi, misi hingga mengembangkan pola pikir dalam kegiatan teror. Adapun contoh dari kalimat yang sering diucapkan dalam proses indoktrinasi ini adalah Agama kami agama terbaik, Agama lain kafir, Menghormat bendera Merah Putih tergolong syirik, Negara Islam Indonesia dan khilafah adalah solusinya, dan lain sebagainya. Orang yang di indoktrinasi cenderung meng-*"copy paste"* kalimat-kalimat yang diucapkan oleh *recruiter*. Hal ini sejalan dengan penuturan para WNI yang pernah bergabung dengan ISIS, dimana mereka berhasil menjadi korban indoktrinasi dari propaganda-propaganda yang dilancarkan oleh ISIS. Proses indoktrinasi kepada mereka pun tidak dilakukan secara langsung dan dalam waktu yang lama, mereka terdoktrin ajaran-ajaran serta paham ekstrem dari ISIS melalui berbagai platform media sosial dan jejaring internet.

Kemudian, wacana pemerintah yang akan mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak simpatisan ISIS yang berusia dibawah 10 tahun menurut kajian yang dilakukan oleh peneliti, mereka tetap berbahaya dan dapat mengancam stabilitas keamanan nasional bahkan kategori ancamannya tergolong tinggi tidak kalah dengan tipe returnis laki-laki dewasa. Hal ini menurut P.W Singer bahwa mayoritas anak-anak berpartisipasi dalam pertempuran karena mereka sudah diajari menggunakan senjata dan di pengaruhi ideologi ekstrem sehingga mereka dengan tidak segan untuk membunuh bahkan melakukan bom bunuh diri. Seperti yang dijelaskan oleh peneliti pada sub bab tipe returnis ISIS, bahwa anak-anak berusia dibawah 10 tahun sudah di ajari cara berperang, merakit bom, di doktrin secara dini, bahkan ikut berperang bersama orang dewasa. Menurut pandangan peneliti, anak-anak dibawah umur 10 tahun pun harus sangat diwaspadai tingkat ancaman yang akan ditimbulkannya, karena mereka lebih berbahaya karena mereka sudah di pengaruhi sejak dini dan

akan menjadi tugas yang berat bagi pemerintah apabila di kemudian hari benar akan memulangkan anak-anak simpatisan ISIS dibawah usia 10 tahun.

Hal ini tentunya harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia, karena berdasarkan data dari BNPT bahwa jumlah milisi teroris asing asal Indonesia meningkat tiap tahunnya. Hingga tahun 2019 saja, total sudah terdapat 1.431 milisi teroris asing asal Indonesia yang akan kembali ke Indonesia dari Suriah (BNPT dalam Didik,2020). Lalu, menurut data dari BIN dalam paparannya saat FGD Program Sinergitas Penanganan Aksi Terorisme Kemenkopolhukam di Manado 29 Oktober 2019, menyatakan bahwa 699 orang telah di deportasi dari Turki dan Irak karena mencoba masuk ke Suriah. Belum lagi dari dalam negeri, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahid Institute menjelaskan bahwa 7,7% menyatakan bersedia berpartisipasi dalam Tindakan radikalisme dan 0,4% mengaku pernah berpartisipasi dalam kegiatan yang berpotensi kekerasan atas nama agama. Lalu, PPIM UIN Syarif Hidayatullah menjelaskan bahwa 23% mahasiswa dan pelajar sedia untuk berjihad demi khilafah dan 18% menyetujui khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang ideal.



Grafik 4.2

Potensi intoleransi di kalangan pelajar dan mahasiswa

Sumber : (PPIM UIN Syarif Hidayatullah)

Dengan kenyataan seperti itu, tentunya pengaruh ISIS di Indonesia patut diwaspadai, karena angka-angka tersebut bukanlah suatu hal yang kecil. Dengan adanya dukungan dari beberapa masyarakat terhadap ajaran ISIS, maka akan semakin memudahkan returnis ISIS menyebarkan propaganda-propaganda keji nya dan tentunya akan berujung pada terjadinya konflik di tengah masyarakat dan akan mengancam stabilitas keamanan nasional.

4.3.2 Peran dan Tantangan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Returnis ISIS

Dengan adanya fenomena kekalahan ISIS di berbagai wilayah kekuasaannya yang mengakibatkan milisi teroris asing ISIS menginginkan pulang kembali ke tanah air, kemudian adanya wacana pemulangan anak-anak dari milisi teroris asing ISIS asal Indonesia tentunya mengakibatkan adanya perhatian yang luas dari berbagai kalangan karena pertimbangan keamanan nasional. Di dalam penelitian ini telah ditekankan mengenai ancaman yang dapat ditimbulkan returnis ISIS, bahkan pendapat dari pejabat keamanan di berbagai negara sepakat memperingatkan mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh returnis ISIS. Misalnya saja pandangan dari Alex Younger yang merupakan seorang kepala MI6 Inggris, mengatakan bahwa returnis ISIS kemungkinan besar telah memperoleh keterampilan dan koneksi yang membuat mereka berpotensi dan sangat berbahaya karena telah mengalami radikalasi ekstrem (McElroy,2019).

Ini mencerminkan bahwa banyak sikap pemerintah dari berbagai negara memiliki pandangan yang hampir bulat mengenai returnis ISIS termasuk wanita dan anak-anak sebagai ancaman bagi negara. Sebagai contoh, pemerintah dan masyarakat Tunisia sepakat dan menanggapi returnis ISIS sebagai ancaman utama yang potensial terhadap keamanan nasional dan hal ini bersifat mematikan bahkan dapat menyebabkan adanya genosida dan konflik besar-besaran yang terjadi di negaranya

(Renard,2019). Lalu, intelijen Israel menyatakan bahwa returnis ISIS dapat bertindak sebagai sel tidur yang dapat diaktifkan kapan saja oleh aktor eksternal dan dapat melakukan serangan teror demi kepentingan aktor tersebut. Bahkan, Jürgen Stock yang merupakan kepala Interpol sangat mengkhawatirkan para returnis ISIS karena kebanyakan dari mereka terlatih dan Tangguh dalam pertempuran dan mereka juga tetap terhubung secara internasional. Stock menyebutkan aka nada scenario “ISIS 2.0”, dimana akan terjadi gelombang kedua dari kebangkitan ISIS karena milisi teroris asing dan simpatisan ISIS telah menyebar ke seluruh negara-negara asalnya, dan hal tersebut akan menimbulkan ancaman yang lebih hebat (Wilsher,2019). Lebih lanjut, returnis ISIS yang mempunyai pengalaman dalam pertempuran ini akan menyebarkan paham ekstrem mereka menjangkiti siapa saja yang mendukung pemikiran mereka sehingga *manpower* ISIS di tiap negara akan bertambah dan tentunya akan jauh lebih mematikan dan tingkatan ancaman terorisme domestik akan semakin tinggi. Maka dari itu, peneliti selanjutnya akan menjelaskan mengenai peran dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi returnis ISIS sehingga potensi ancaman yang ada dapat di minimalisir.

Berdasarkan penjelasan data dan fakta yang telah peneliti jelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa ancaman returnis ISIS patut diwaspadai. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hegghammer ditemukan bahwa plot yang melibatkan milisi teroris asing cenderung lebih mematikan, hal ini kemudian menunjukkan bahwa returnis ISIS memang berbahaya daripada teroris domestik yang cenderung tidak mempunyai pengalaman tempur seperti berperang di negara asing (Hegghammer,2013). Sehingga peran pemerintah, khususnya Lembaga terkait, harus lebih serius menanggapi ancaman serangan yang datang kemudian. Lembaga-lembaga pemerintah terkait melalui peningkatan kapabilitas deteksi intelijennya harus dapat dengan lebih cepat mencegah dan menangkal aksi-aksi lebih besar dan serius yang ditimbulkan oleh returnis ISIS yang akan datang di kemudian hari. Kondisi geografis dan demografis Indonesia yang sangat luas dan

beragam telah menyediakan potensi yang amat rawan bagi munculnya aksi-aksi terorisme ISIS lebih besar lagi di masa mendatang. Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini oleh pemerintah agar dapat menyiapkan strategi pencegahan dan penanggulangan aksi-aksi (serangan) terorisme internasional secara lebih efektif dan baik lagi.

Penyesuaian modus operandi aksi-aksi terorisme yang dilakukan returnis ISIS/IS yang jauh lebih efisien dan efektif dan cepat harus segera dapat direspons dengan solusi yang efektif pula oleh pemerintah Indonesia. Jika tidak, ISIS/IS dapat lebih mudah lebih banyak lagi mencari sasaran target serangan dan melaksanakan agenda mereka secara lebih berhasil. Perubahan lingkungan strategis di Timur-Tengah, yang menunjukkan semakin terdesaknya kekuatan ISIS/IS oleh serangan pasukan koalisi Barat pro-AS dan Rusia, serta Turki, dan meningkatnya radikalisme dan konservatisme beragama di Indonesia, menambah berbahaya (destabilitas) ancaman yang diciptakan ISIS/IS di Indonesia. Ini artinya, Indonesia akan menjadi arena operasi atau mandala perang ISIS/IS yang baru dan sangat potensial dan menjanjikan, jika basis-basis mereka di TimurTengah jatuh.

Dengan adanya potensi ancaman dari returnis ISIS, dapat menciptakan instabilitas keamanan nasional. Dalam jangka panjang, situasi ini akan melahirkan anarkisme di masyarakat akibat adanya dua kubu di tengah masyarakat, munculnya konflik horizontal antara mereka yang mendukung dan menentang returnis ISIS. Karakter konflik menjadi kompleks, karena yang saling berhadap-hadapan bukan lagi antara kelompok antar-agama namun juga dalam sesama agama yang saling bertentangan akibat pandangan ISIS/IS yang sangat ideologis dan monolitik. Bersama dengan krisis-krisis lainnya yang muncul dan terakumulasi sejak lama akibat berbagai macam konflik, baik horizontal maupun vertikal, yang tidak diselesaikan dan terselesaikan, dalam skenario terburuk dan perkiraan yang sangat pesimistik, bukan mustahil, kehadiran

dan sepak-terjang para pengikut ISIS/IS di Indonesia akan membuat Indonesia menjadi negara gagal (*failed state*) baru. Hal ini akan memperburuk global disorder yang tercipta dalam tata dunia yang ada di milenium baru, di abad ke-21.

Lebih lanjut, untuk menganalisa mengenai konflik yang akan ditimbulkan oleh returnis ISIS, peneliti akan menggunakan teori konflik menurut Conley yang menjelaskan bahwa umumnya terjadinya suatu konflik ialah karena adanya kemampuan dan keinginan suatu kelompok untuk menekan kelompok lainnya. Mereka berusaha menentang hukum yang ada dengan dalih memelihara tatanan sosial akan tetapi itu dilakukan untuk menguntungkan kelompok tertentu saja dengan mengorbankan orang lain (Conley,2013). Para ahli teori konflik memandang terorisme sebagai reaksi terhadap ketidakadilan, yang kemudian tercipta dalam benak teroris karena sesat ilmu, buta arah, maupun tujuan yang tergolong tidak realistis. Perilaku kekerasan yang di ekspresikan oleh organisasi teroris adalah hasil dari frustrasi individu sehingga menimbulkan aksi nekad untuk bertarung. Menurut data dari Hartman dan Bryn dijelaskan bahwa mayoritas aksi teror dilakukan oleh orang-orang yang dapat dikatakan beragama. Di 83% dari pelaku bom bunuh diri di seluruh dunia, hingga tahun 2013 di identifikasikan karena motif agama. Hal ini kemudian menjadi semakin jelas dengan penuturan dari narasumber Nasir Abbas yang merupakan mantan petinggi (Mantiqi 3) Jama'ah Islamiyah, beliau menyatakan bahwa mereka yang bergabung dengan kelompok ekstremis rata-rata orang yang mempunyai ilmu agama yang cukup mumpuni. Lalu, berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dr. Didik Novi Rahmanto menjelaskan bahwa mayoritas WNI yang bergabung dengan ISIS adalah seseorang yang mempunyai ilmu agama yang cukup tinggi dan juga orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap agama. Mereka menambakan suatu kondisi dunia yang adil dan terbebas dari segala bentuk kekurangan. Hal tersebut relevan apabila dikaitkan dengan

Just World Theory yang memperlihatkan beberapa elemen yang berperan membentuk pemikiran yang menopang motivasi returnis ISIS.

No	Elemen	Dikategorikan Sebagai
1	<i>Believe what they deserve</i>	Surga (yang diperoleh dari hasil pengetahuan)
		Khilafah Nabi (yang diperoleh dari hasil pengetahuan)
		Hijrah (pahala karena berhijrah)
		Jihad (gugurnya kewajiban untuk jihad)
2	<i>Cultural Wisdom dan Morality Tales</i>	Ekspektasi (yang diperoleh dari hasil pengetahuan dan kepercayaan)
		Ayat dan hadist dalam Agama (mengatur perilaku baik)
3	<i>Status Role</i>	Mujahidin (bagi yang ingin berjihad)
		Muhajirin (bagi yang ingin berhijrah saja)

Tabel 4.2

Analisa Just World Theory

(Sumber: Didik Novi Rahmanto,2020)

Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa mereka yang terpengaruh paham ISIS adalah mereka yang memiliki dasar kebencian di benak mereka, salahsatunya memiliki kebencian terhadap pemerintah dan orang-orang yang berbeda serta tidak sepaham dengan mereka.

Returnis ISIS yang notabene telah memiliki kemampuan tempur dan memiliki ideologi ekstrem akan cenderung menggunakan kekerasan, karena mereka percaya bahwa jika mereka tidak menggunakan kekerasan, mereka akan kehilangan perebutan kekuasaan, sampai disini saja sudah jelas bahwa mereka membenarkan Tindakan mereka dalam istilah agama.

Perlu diketahui bahwa returnis ISIS tidak memiliki cukup uang dan kekuatan politik untuk berperang, sehingga mereka menggunakan cara-cara kekerasan dan memanfaatkan konflik sebagai alat untuk menghasut masyarakat umum dan menggoyahkan wibawa pemerintah untuk mencapai tujuan politik mereka. Sebelum melakukan Tindakan amaliyah, seorang teroris tidak selalu menimbang kerugian dan keuntungan dari tindakannya kepada orang lain, tetapi mencari keuntungan untuk dirinya sendiri di akhirat dan mendapatkan pengakuan dari komunitasnya. Sehingga jelas para returnis ISIS ini akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat dan mereka akan memainkan perannya.

Maka dari itu, peran pemerintah harus bersifat kolaboratif dan bersinergi dalam menghadapi potensi konflik yang diakibatkan oleh returnis ISIS ini. Dalam melihat peran pemerintah, peneliti akan menggunakan teori *role of government* yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan (Siagian, 2009). Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan social (Sumaryadi,2010). Maka dari itu, berdasarkan penjelasan mengenai konsep peran pemerintah diatas pada intinya berbicara mengenai tanggung jawab dari Negara yang mana dalam hal ini adalah pemerintah sebagai representasi dari Negara dalam memberikan perlindungan bagi warga nya dari segala bentuk ancaman termasuk ancaman returnis ISIS.

Sehingga, apabila kita berbicara mengenai tanggung jawab Negara maka akan berkorelasi dengan pernyataan Hegel, dimana pertanggung jawaban (*schuld*) merupakan pengejawantahan dari karakter kemanusiaan

(*bestimmung*), atau secara singkat pertanggung jawaban ialah sisi kemanusiaan kita. Bagi Hegel, pertanggung jawaban dimaknai sebagai suatu yang normatif, sesuatu yang obyektif, dan pelaksanaannya hanya dilakukan bilamana dalam taraf ethical evaluation (evaluasi etik) tanpa harus bertanggung jawab secara spesifik apa yang benar (*rechtlich*) atau secara moral (*moralisch*). Selain itu, menurut Hegel, suatu pihak hanya dapat dimintai pertanggung-jawabannya hanya jika ia dianggap pantas untuk dimintai bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, sejauh dia mengetahui apa yang telah dilakukan, serta mengetahui apakah yang dilakukan itu baik atau buruk.

Ditinjau dari teori *role of government* diatas, bahwa bentuk pertanggung jawaban (*schuld*) merupakan pengejawantahan dari karakter kemanusiaan (*bestimmung*) dan juga suatu pihak hanya dapat dimintai pertanggung-jawabannya hanya jika ia dianggap pantas untuk dimintai bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan tegas menolak memulangkan milisi teroris asing ISIS asal Indonesia bahkan memberikan label simpatisan ISIS Eks-WNI. Pemerintah Indonesia juga melalui Lembaga-lembaga pemerintahan membentuk suatu desk khusus yang mengatasi milisi teroris asing asal Indonesia. Akan tetapi, saat ini peran pemerintah dalam menangani permasalahan returnis ISIS belum sepenuhnya optimal karena pada saat implementasi di lapangan terdapat berbagai tantangan.

Lebih lanjut, berdasarkan data dan fakta mengenai ancaman dari returnis ISIS, kita dapat melihat dengan jelas bahwa mereka memiliki potensi ancaman yang tinggi terhadap keamanan nasional bahkan dapat memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat. Sehingga, diperlukan peran pemerintah yang efektif melalui formulasi kebijakan yang tepat. Akan tetapi kenyataannya, saat ini pemerintah mengalami berbagai tantangan dalam upaya mengatasi returnis ISIS dan mencegah potensi konflik yang akan ditimbulkan.

Adapun tantangan yang dihadapi pemerintah tersebut ialah *pertama*, mengenai masalah hukum. Sudah banyak negara-negara memiliki tantangan besar dalam perspektif hukum, negara-negara seringkali mendapatkan ketiadaan dasar hukum yang jelas diperlukan untuk mengatasi returnis termasuk mengadili maupun melarang kedatangan mereka yang bergabung dengan kelompok teroris internasional. Apabila melihat ketentuan hukum dari undang-undang di Amerika Serikat, mereka melarang upaya warga negaranya untuk bergabung dengan organisasi teroris asing yang mana secara rinci dijelaskan juga mengenai organisasi apa saja yang dilarang, Amerika Serikat juga akan menolak mereka yang telah bergabung dengan kelompok teroris di luar negaranya (U.S. Code 2339B). Dilihat dasar hukum yang jelas dan rinci dalam ketentuan hukum dari undang-undang di Amerika Serikat, apabila dikaitkan dengan terkait pencabutan warga negara. Tindakan yang menjadi sorotan adalah perobekan paspor Indonesia oleh beberapa WNI eks ISIS. Namun hal tersebut tidak dapat serta merta diartikan bahwa mereka telah mencabut kewarganegaraannya. Dalam kerangka hukum Indonesia, pencabutan kewarganegaraan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 12/2006) dan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Perpres 2/2007). Dalam UU 12/2006 dan Perpres 2/2007 disebutkan kondisi dimana seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya, yaitu “Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden” dan “secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada atau bagian dari negara asing tersebut.”

Pemerintah juga tidak dapat melakukan pencekalan atau pelarangan terhadap WNI eks ISIS yang ingin kembali ke Indonesia, karena dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa setiap WNI tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia. Pasal 27 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan

bahwa “warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Tidak ada dasar hukum untuk melarang WNI kembali ke Indonesia.

Sehingga, pilihan untuk mencekal apalagi mencabut kewarganegaraan sebagai hukuman terhadap WNI eks ISIS dikhawatirkan justru memberikan legitimasi bagi keberadaan ISIS itu sendiri sebagai sebuah entitas politik. Tidak hanya itu, dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 juga telah menjamin hak seseorang atas status kewarganegaraan sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang mana Indonesia juga merupakan negara pihak, juga telah disebutkan bahwa “setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan.” Selain itu, Pasal 24 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga mengatur bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan”. Akan tetapi, apabila pemerintah memang memiliki ketegasan untuk mencabut kewarganegaraan simpatisan ISIS, maka seharusnya Presiden harus berani mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penguguran status kewarganegaraan WNI terduga teroris pelintas batas eks ISIS. Hal tersebut sebenarnya sesuai dengan PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam PP tersebut diatur pencabutan kewarganegaraan bisa dilakukan oleh presiden melalui proses hukum administrasi.

Terkait dengan opsi pengadilan, Pemerintah sebenarnya memiliki opsi terhadap WNI eks ISIS yang ingin kembali ke Indonesia, yaitu diadili secara hukum. Tindakan yang dilakukan oleh ISIS telah ditetapkan sebagai tindakan terorisme oleh Dewan Keamanan PBB. Presiden Dewan Keamanan PBB telah menyatakan bahwa Dewan Keamanan sangat mengutuk tindakan terorisme, termasuk oleh organisasi teroris yang

beroperasi dengan nama ISIS di Irak, Suriah, dan Lebanon. Dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme), disebutkan bahwa intinya setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Para WNI eks ISIS tersebut dapat dijerat dengan hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Terorisme dan. Pasal 3 UU Terorisme menyebutkan bahwa peraturan ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain yang juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut. Opsi pasal lainnya yang dapat dikenakan terhadap WNI eks ISIS adalah perbuatan makar terhadap negara sahabat, dalam hal ini di negara Suriah, yaitu Pasal 139b KUHP. Berdasarkan asas nasional aktif pada Pasal 5 ayat (2) KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Sehingga kesimpulannya meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia, tindakan yang dilakukan oleh WNI eks ISIS tetap dapat diadili dengan hukum Indonesia. Kondisi lainnya, beberapa WNI eks ISIS tersebut juga dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam hal terdapat dugaan serius mereka melakukan pelanggaran, baik pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional maupun pelanggaran terhadap hukum pidana internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, opsi pengadilan ini justru akan memakan waktu yang cukup lama

dan bukan suatu kemustahilan para returnis ISIS terlanjur dapat menggoyahkan stabilitas keamanan nasional dengan penyebaran paham ekstrem dan aksi-aksi terornya di Indonesia. Sehingga, berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa opsi pengadilan tidak akan efektif dalam menghadapi returnis ISIS.

Lebih lanjut, berdasarkan sepaik terjang dari ISIS yang telah mengakibatkan banyak kehancuran di Suriah dan Irak, lalu simpatisan ISIS juga pernah melakukan serangannya di Indonesia, maka sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia melakukan respon yang cepat. Pemerintah tidak boleh kaku terhadap hukum yang ada karena apabila berhadapan dengan ancaman negara, Wibawa Pemerintah harus dijunjung tinggi apabila mengedepankan keselamatan bangsa dan negara.

Kedua, Kolaborasi antar Lembaga pemerintah. Untuk mengkaji permasalahan ini peneliti akan menggunakan konsep *Collaborative Governance* dari Ansell and Gash dijelaskan bahwa secara khusus, *collaborative governance* menjelaskan tentang konteks kerja sama antarlembaga pemerintahan dengan menekankan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horisontal antara partisipan yang bersifat multisektoral, karena tuntutan tugas yang melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, serta membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Saat ini, seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya berdasarkan penuturan dari beberapa informan yang berasal dari beberapa Lembaga pemerintah terkait, diketahui bahwa saat ini kolaborasi dan sinergitas antar Lembaga belum maksimal dan harus di maksimalkan. Hal itu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia belum mencapai kolaborasi horisontal dan hubungan horisontal yang bersifat multisektoral, karena masih terdapat beberapa perbedaan pandangan dan juga masih adanya ego sektoral sehingga dalam pencapaian keputusan tergolong lambat.

Ketiga, penjagaan di perbatasan negara. Berdasarkan data dan fakta mengenai kegiatan pengamanan di daerah perbatasan yang dilakukan secara terus menerus oleh aparat keamanan dan Lembaga pemerintah terkait, saat ini masih saja mengalami berbagai kendala karena berbagai permasalahan mulai dari fasilitas dan juga faktor kemampuan personel di lapangan. Sehingga, diperlukan peningkatan dan perbaikan dari segala kekurangan yang ada guna memaksimalkan pengamanan dan penjagaan seluruh perbatasan negara dari kegiatan lalulintas returnis ISIS.

4.3.3 Model Kerja Sama Kolaboratif dan Terintegrasi bersifat Semesta (*Integrated Total Cooperation Model*)

Dari data dan fakta beserta analisa yang telah dijelaskan sebelumnya, ditemukan bahwa peran pemerintah dalam menghadapi returnis ISIS dan ancaman terorisme saat ini memang sudah cukup baik akan tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hal tersebut diakibatkan karena salahsatunya ialah kurangnya kolaborasi dan sinergitas antar lembaga, pemerintah saat ini juga kurang melibatkan masyarakat sipil terutama tokoh agama seperti ulama. Pelibatan masyarakat umum khususnya ulama dalam menghadapi paham ekstrem yang dibawa oleh returnis ISIS menjadi sangat penting untuk di perhatikan. Maka dari itu, peneliti menyarankan suatu model kerjasama kolaboratif dan terintegrasi yang bersifat semesta (*Integrated Total Cooperation Model*). Adapun untuk menjelaskan mengenai model kerjasama ini, peneliti akan menggunakan beberapa teori serta konsep yang relevan.

Secara formal pemerintah telah menetapkan radikalisme dan terorisme sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan negara. Kemudian diperjelas dalam Peraturan Presiden No.8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara dijelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi ancaman yang berasal dari dalam negeri salahsatunya ialah ialah

terorisme dan radikalisme. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah dapat mempersiapkan aparatur dalam menanggulangi ancaman-ancaman terhadap stabilitas keamanan negara. Tentunya, ini bertujuan menciptakan rasa aman sebagai dasar membangun masyarakat yang sejahtera (Kemendagri, 2017 hal vii). Penetapan radikalisme dan terorisme sebagai ancaman keamanan negara tentunya membawa konsekuensi politik. Berangkat dari landasan ideologis sebagai negara hukum yang berdasarkan nilai Pancasila, Pemerintah dan Lembaga Legislatif bersama-sama merumuskan kerangka regulasi bagi kebijakan ini.

Dengan adanya fenomena kepulangan milisi teroris asing asal Indonesia ke tanah air dan menjadi returnis, tentunya hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam menghadapi ancaman tersebut. Pengaruh dari returnis ISIS seperti yang telah dijelaskan sebelumnya patut diwaspadai dan akan memberikan dampak yang mematikan, apalagi saat ini Indonesia sedang dilanda krisis akibat pandemi. Returnis ISIS akan dengan mudah memanfaatkan situasi saat ini, yang mengharuskan pemerintah fokus terhadap penanganan krisis akibat pandemi.

Maka dari itu, strategi kontra propaganda harus lebih dipertajam. Peran intelijen akan sangat berarti dalam menghadapi propaganda-propaganda yang dilancarkan oleh ISIS dan juga returnis nya. Berdasarkan konsepsi kontra propaganda menurut Herbert dijelaskan bahwa kontra propaganda adalah bentuk komunikasi yang terdiri dari metode yang diambil dan pesan yang disampaikan untuk menentang propaganda yang berupaya mempengaruhi tindakan atau perspektif di antara audiens yang ditargetkan. Ini terkait erat dengan propaganda karena keduanya sering menggunakan metode yang sama untuk menyiarkan metode kepada audiens yang ditargetkan. Kontra propaganda merupakan upaya untuk menangkal dan melawan potensi teror yang ekstrem dan biasa dipropagandakan returnis ISIS melalui berbagai media. Peran Lembaga

terkait seperti Komunitas intelijen daerah, BIN, BNPT, dan juga Intelijen Keimigrasian, Kemenkumham RI akan sangat berarti dalam upaya menghalau propaganda yang dikerahkan oleh returnis ISIS.

Sehingga, konsep *role of government* dari Sumaryadi akan relevan dengan hal ini karena dalam konsep tersebut mengutamakan penciptaan keamanan dasar (*basic security*) manusia. Dalam pelaksanaannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menangani fenomena returnis ISIS jelas membutuhkan peran dari Lembaga-lembaga terkait akan tetapi saat ini Lembaga-lembaga tersebut belum berkolaborasi dengan baik. Sehingga, berdasarkan konsep *Collaborative Governance* yang menjelaskan tentang konteks kerja sama antarlembaga pemerintahan dengan menekankan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horisontal antara partisipan yang bersifat multisektoral, karena tuntutan tugas yang melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, serta membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan aktivitas *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif dalam menjawab tantangan akan meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan aktivitas yang bersifat lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral (Agnarof, 2003).

Perlu dipahami berkaitan dengan fenomena yang peneliti angkat bahwa konsep *collaborative governance* akan menekankan pada pentingnya membangun sebuah kerja sama antar Lembaga pemerintah dan juga masyarakat umum khususnya pemuka agama (ulama) yang berdasarkan kepada timbulnya konsensus satu sama lain, bukan berdasarkan kepada kompetisi individual di antara anggota kelompok. Masing-masing pihak yang ada di dalam kerangka kerja sama harus berusaha saling menghargai dan memberikan kontribusinya sehingga ego sektoral harus ditekan. Kompleksitas dalam sebuah permasalahan berakibat pada timbulnya kondisi saling ketergantungan sehingga meningkatkan permintaan akan kolaborasi.

Pelibatan berbagai pihak termasuk masyarakat umum khususnya ulama dalam upaya mengatasi permasalahan returnis ISIS, sesuai dengan konsep pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta. Implementasi dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Maka dari itu, dengan model Kerjasama kolaboratif dan terintegrasi yang bersifat semesta ini akan lebih memaksimalkan upaya mengatasi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh returnis ISIS. Adapun implementasi dari model Kerjasama kolaboratif dan terintegrasi yang bersifat semesta ini ialah dibentuknya suatu lembaga yaitu Dewan Keamanan Nasional (DKN), dimana DKN ini akan mengambil langkah-langkah strategis dengan cepat sebagai respon terhadap potensi ancaman yang akan datang. DKN akan berisikan berbagai pihak termasuk masyarakat umum, dimana ini merupakan kolaborasi antara pertahanan militer dan nirmiliter bersifat semesta.